

**MENANTI EMITEN BARU DARI ANAK BUMN**



**DESEMBER 2019**

# **EDUKASI KONSUMEN**

**SIKAPIUANGMU.OJK.GO.ID**



## **SEKTOR JASA KEUANGAN STABILITAS TETAP TERJAGA DAN TERKENDALI**



**SURVEI OJK  
INDEKS LITERASI DAN  
INKLUSI KEUANGAN 2019 MENINGKAT**

# DELAPAN TAHUN OJK BERDIRI MEMBANGUN NEGERI

**TH**



**OTORITAS JASA KEUANGAN**  
Kontributif dan Inklusif Membangun Negeri

# INDUSTRI JASA KEUANGAN TERUS BERGERAK MEMAJUKAN INDONESIA

Pemerintahan baru Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah terbentuk. Kabinet Indonesia Maju periode lima tahun mendatang juga sudah mulai bekerja untuk menjalankan sasaran dan visi-misi yang diusung pemerintahan.

Situasi dalam negeri dengan rampungnya pelantikan presiden dan wakil presiden, serta penyusunan kabinet, cukup stabil.

Kestabilan pemerintahan, terutama kondisi politik yang cukup tenang, akan memberikan dampak bagi kegiatan usaha. Hal itu pula yang didampakan oleh pebisnis dan pelaku usaha di industri jasa keuangan.

Kendati situasi global tidak menentu, Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan ekonomi cukup baik sepanjang 2019. Ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata di atas 5% saat sejumlah negara lain mengalami pelambatan.

Pertumbuhan yang patut disyukuri sebagai modal mengarungi tahun depan. Setidaknya, situasi ekonomi tahun depan memang tidak mudah.

Akan tetapi, bermodal kebersamaan dan kestabilan situasi di dalam negeri, harapannya Indonesia mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan kerja bersama yang dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Sesuai sasaran pemerintahan yang ingin menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menempatkan pengembangan kapasitas SDM sebagai prioritas utama.

Otoritas menyadari bahwa tantangan industri jasa keuangan ke depan memang semakin kompleks. Oleh sebab itu, kesadaran membangun SDM diharapkan menjadi kunci menghadapi era

persaingan dengan melakukan kerja sama berbagai pihak.

Peningkatan kapasitas SDM didukung dengan transformasi proses bisnis internal OJK berbasis teknologi, sehingga dapat menghasilkan hasil kerja yang lebih berkualitas, cepat, tepat dan efisien.

Selain itu, upaya OJK untuk mendorong inklusi keuangan dengan memberikan pembekalan dan pengetahuan bagi masyarakat terhadap akses keuangan akan terus dilakukan.

Upaya memperkuat basis-basis keuangan di kelompok masyarakat tentu saja memiliki tujuan untuk mengoptimalkan sumber ekonomi sebagai upaya memperkuat struktur perekonomian dalam negeri.

Kerja tersebut akan terus dilakukan agar peran industri jasa keuangan di dalam negeri benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. ●



**Dewan Pelindung:** Wimboh Santoso (Ketua Dewan Komisiner OJK)

**Dewan Penasehat:** Tirta Segara (Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen),

**Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi:** Sarjito (Deputi Komisiner Edukasi dan Perlindungan Konsumen)

**Redaktur Ahli:** Sondang Martha Samosir (Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan), Rudi Saleh (Kepala Departemen Perlindungan Konsumen), Horas V.M. Tarihoran (Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan), Rela Ginting (Direktur Penelitian Kebijakan dan Pengaturan EPK), Edwin Nurhadi (Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan), Agus Fajri Zam (Direktur Pelayanan Konsumen), Bernard Widjaja (Direktur Market Conduct)

**Redaktur:** Greta Joice Siahaan (Deputi Direktur Literasi dan Informasi)

**Redaksi:** Anggota Tim Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan

Alamat Redaksi: Bidang Edukasi & Perlindungan Konsumen OJK Menara Radius Prawiro Lantai 2, Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jl. MH Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350

Telepon: (021) 29600000 Faksimili: (021) 3866032 Website: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Majalah Edukasi Konsumen dapat diunduh pada minisite OJK: [sikapiuangmu.ojk.go.id](http://sikapiuangmu.ojk.go.id)

Redaksi menerima kiriman naskah dan berhak mengedit naskah tanpa menghilangkan intisari dari artikel sebelum dipublikasikan

# Daftar Isi

Edisi Desember 2019



## SOROTAN UTAMA

### Sektor Jasa Keuangan

## Stabilitas Tetap Terjaga dan Terkendali

Stabilitas sektor jasa keuangan hingga pekan keempat Oktober 2019 dalam kondisi terjaga di tengah perlambatan pertumbuhan perekonomian global. Intermediasi sektor jasa keuangan tercatat membukukan perkembangan yang stabil dengan profil risiko yang terkendali.

5

### 3 SALAM REDAKSI

Industri Jasa Keuangan Terus Bergerak Memajukan Indonesia

### 10 PERSPEKTIF

Komitmen Memberi Insentif Fiskal dan Perbaikan

### 12 FOKUS PASAR MODAL

Mempertahankan Kestabilan Pasar

### 14 FOKUS PERBANKAN

Intermediasi Perbankan Tersendat

### 16 FOKUS GLOBAL

Indonesia Jadi Percontohan di ASEAN

### 18 INFO PASAR MODAL

Menanti Emiten Baru dari Anak BUMN

### 20 INFO PERBANKAN

Rivalitas Perbankan, Antara *Fintech* dan Alih Teknologi

### 22 INFO IKNB

Potensi di Balik Skor Pensiun Indonesia

### 24 INFO PEMBIAYAAN

Tekanan Masih Membayang

### 26 TINJAUAN REGULASI

SDM *Multifinance* Wajib Sertifikasi

### 28 BISNIS PEMULA

Menjajal Peluang Bisnis Asuransi Digital

### 30 WASPADA INVESTASI

Investasi Ilegal yang Kian Berkembang

### 32 TELAHAH PRODUK

Geliat Investasi ETF

### 36 ANGKA BICARA

Penggunaan Uang Elektronik Terus Meningkat

### 39 TOKOH

Pendidikan di Indonesia Belum Maksimal Hasilkan SDM yang Kompeten di Bidangnya

## KONSUMEN BICARA 34 Menjual ORI Sebelum Jatuh Tempo



## 37

### INSPIRASI

Octavianus Budiyanto  
Presiden Director  
PT Kresna Sekuritas



Harus Ada Level  
Playing Field  
yang Sama

### 41 SERI PENGETAHUAN UMUM

- Lebih Terjaga dengan *Fintech Data Center*
- Aneka Akad Dalam Pembiayaan Syariah
- Hubungan Antara Obligasi dan Peringkat Utang Perusahaan

### 44 ARTIKEL

- Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan 2019 Meningkat
- *Fintech* Menjamur Beri Andil Capai Target Inklusi Keuangan

### 47 KABAR OTORITAS

- Wadah untuk Kenalkan Ragam Produk Keuangan
- OJK Banyak Terima Pengaduan Soal *Debt Collector Leasing*

## 50 INSIGHT

Stabilitas Terjaga dengan Kerja Bersama



Sektor Jasa Keuangan

# STABILITAS TETAP TERJAGA DAN TERKENDALI



**Stabilitas sektor jasa keuangan hingga pekan keempat Oktober 2019 dalam kondisi terjaga di tengah perlambatan pertumbuhan perekonomian global. Intermediasi sektor jasa keuangan tercatat membukukan perkembangan yang stabil dengan profil risiko yang terkendali.**



## SOROTAN UTAMA

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso. Menurutnya, dinamika perekonomian global pasti berdampak ke Indonesia, termasuk sektor jasa keuangan dan sektor riil.

“Untuk itu diperlukan sinergi yang kuat dalam membangun sektor prioritas pemerintah. Sektor jasa keuangan juga masih memiliki ruang permodalan untuk mendorong perekonomian nasional,” ujar Wimboh dalam panel diskusi *CEO Networking 2019* yang bertema “*Embracing the Opportunities in Dynamic Global Economy*” dalam rangkaian HUT ke-42 Tahun Pasar Modal Indonesia bagi CEO dan *Stakeholders* di Pasar Modal Indonesia, Kamis, 31 Oktober 2019.

Wimboh menjelaskan bahwa diperlukan strategi dalam menguatkan stabilitas sektor jasa

keuangan di tengah pelemahan ekonomi global antara lain dengan meningkatkan permodalan, likuiditas, dan Cadangan Kerugian Penilaian Nilai (CKPN), kemudian membangun kepercayaan pasar, mendorong mesin baru penggerak sektor riil dan mengembangkan sektor berefek bergulir, seperti pariwisata, industri ekspor dan substitusi impor.

“Dinamika perekonomian global pasti berdampak ke Indonesia termasuk sektor jasa keuangan dan sektor riil. Untuk itu diperlukan sinergi yang kuat dalam membangun sektor prioritas pemerintah. Sektor jasa keuangan juga masih memiliki ruang permodalan untuk mendorong perekonomian nasional,” ujar Wimboh.

Menurut Wimboh, diperlukan strategi dalam menguatkan stabilitas sektor jasa keuangan di tengah pelemahan ekonomi global antara lain

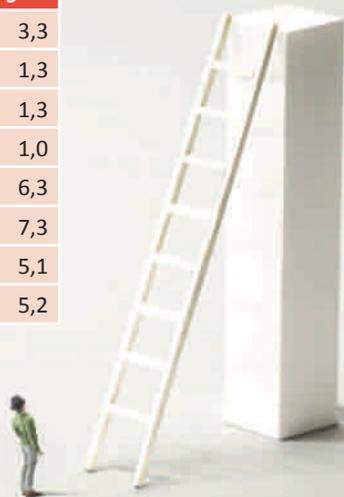
**Dinamika perekonomian global pasti berdampak ke Indonesia termasuk sektor jasa keuangan dan sektor riil. Untuk itu diperlukan sinergi yang kuat dalam membangun sektor prioritas pemerintah. Sektor jasa keuangan juga masih memiliki ruang permodalan untuk mendorong perekonomian nasional**



## Pertumbuhan Negara–Negara Dunia Diperkirakan Konvergen ke Arah Perlambatan Tahun 2019

Ekonomi	2018	2019
Dunia	3,6	3,3
Amerika Serikat	1,8	1,3
Kawasan Euro	1,8	1,3
Jepang	0,8	1,0
China	6,6	6,3
India	7,1	7,3
Asean-5	5,2	5,1
Indonesia	5,2	5,2

Sumber: IMF 2019, Menkoekuin: Outlook Perekonomian Indonesia 2019.



- \*) Moderasi pertumbuhan di berbagai negara menekan pertumbuhan dunia hingga diproyeksi akan mengalami deselerasi ke 3,3%.
- \*) Sementara perdagangan global masih diliputi ketidakpastian, pasar komoditas akan mengalami pemulihan untuk beberapa komoditas, seperti minyak, aluminium, tembaga, nikel, dan timah, serta komoditas pertanian secara umum.

dengan meningkatkan permodalan, likuiditas, dan Cadangan Kerugian Penilaian Nilai (CKPN), kemudian membangun kepercayaan pasar, mendorong mesin baru penggerak sektor riil dan mengembangkan sektor berefek bergulir, seperti pariwisata, industri ekspor dan substitusi impor.

Menurut data OJK pada September 2019 menunjukkan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* perbankan sebesar 23,38%, *Risk Based Capital (RBC)* asuransi jiwa 667,47%, RBC asuransi umum 321,4% dengan *gearing ratio* perusahaan pembiayaan 2,72 kali. Risiko kredit dan pembiayaan juga terjaga dengan *Non Performing Loan (NPL) gross* 2,66% dan *NPL nett* 1,15%. *Non Performing Financing (NPF) gross* 2,66% dan *NPF nett* 0,55%.

Kredit perbankan sampai September 2019 mencapai Rp5.524,19 triliun atau tumbuh 7,89% (*yoy*), antara lain ditopang kredit infrastruktur Rp777,89 triliun (16,67%/yoy), kredit pariwisata

Rp131,56 triliun (7,35%/yoy), kredit pengolahan Rp917,46 triliun (5,54%/yoy), kredit perikanan kelautan Rp93,22 triliun (0,07%/yoy) dan kredit perumahan Rp512,8 triliun (9,99%/yoy).

Dana Pihak Ketiga perbankan mencapai Rp5.891,92 triliun atau tumbuh 7,4% (*yoy*). Penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp140,3 triliun dengan jumlah IPO sebanyak 40 perusahaan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa meski perlambatan ekonomi global akan mempengaruhi perekonomian nasional, Indonesia diyakini bisa menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%. "Indonesia memiliki pertumbuhan 5% selama 10 tahun ini. Meski di luar *global environment* (terjadi perlambatan) Indonesia bisa menjaga pertumbuhan di atas 5%," tuturnya dalam panel diskusi *CEO Networking 2019* itu.

Indonesia memiliki kemampuan menjaga pertumbuhan itu, lanjut Sri Mulyani, karena ekonomi cukup

besar. *Size market*-nya mampu menjadi *insurance* untuk menopang ketidakpastian *global environment*. Ini merupakan potensi yang besar.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan menjaga ekonomi Indonesia yang harus dapat diimbangi optimisme dari CEO dan aktor ekonomi industri nasional. Pemerintah sadar dinamika kondisi tidak terlalu positif, tapi di dalam negeri punya optimisme tinggi. Bahkan, dia menambahkan, pemerintah akan menciptakan dampak kebijakan yang kongkrit dengan bekerja sama antar menteri dan daerah.

### Kinerja Pasar Modal

Sementara itu, Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah memfasilitasi sebanyak 46 perusahaan untuk menggelar penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*) saham sejak awal tahun hingga 18 November 2019. Total penggalangan dana yang dihimpun dari 46 emiten itu mencapai Rp12,46 triliun.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia I Gede Nyoman Yetna Setya mengungkapkan bahwa saat ini ada 38 perusahaan dalam *pipeline* yang siap *go public* melalui IPO pada tahun ini. Jika semua *pipeline* berhasil dieksekusi pada sisa bulan 2019, jumlah perusahaan yang IPO pada tahun ini bakal mencetak rekor baru yakni mencapai 84 emiten.

“Ada 4 emiten yang menggunakan laporan keuangan per Agustus dan September, sedangkan 34 lainnya menggunakan laporan keuangan per Juni yang siap tercatat tahun ini,” katanya, Senin 18 November 2019.

Menurutnya, otoritas melakukan *screening* yang ketat terhadap perusahaan yang akan IPO agar seluruh calon emiten tersebut betul-betul dapat menjadi emiten dengan membawa prospek yang cerah dan pertumbuhan fundamental yang kuat.

Menurut Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi, aktivitas pencatatan saham (*listing*) di Indonesia merupakan yang tertinggi ketujuh di dunia dan memiliki tren pertumbuhan paling tinggi dibandingkan dengan bursa lain di kawasan ASEAN dalam lima tahun terakhir.

Pertumbuhan positif itu sejalan dengan pertumbuhan jumlah investor yang mencapai 2,2 juta per 31 Oktober 2019 atau rekor tumbuh dua digit dalam 5 tahun terakhir. “Menariknya adalah pertumbuhan investor milenial saat ini mencapai 60% dari total investor saham dan terus meningkat dalam kurun 3 tahun terakhir,” jelasnya.

Dalam rangka mendorong perluasan akses perusahaan ke pasar modal, BEI telah meluncurkan papan pencatatan akselerasi. Selain itu, BEI dan SRO lainnya juga memberikan insentif kemudahan persyaratan pencatatan saham perusahaan kecil dan menengah, serta melonggarkan papan pencatatan akselerasi.

Di pihak lain, relaksasi dan insentif juga diberikan oleh otoritas

**OJK senantiasa memantau dinamika perkembangan ekonomi global dan berupaya memitigasi dampak kondisi yang tidak mendukung ini terhadap kinerja sektor jasa keuangan domestik terutama terkait dengan profil risiko likuiditas dan risiko kredit.**



fiskal. Dalam RUU Omnibus Law Perpajakan, pemerintah berencana untuk menurunkan tarif PPh badan menjadi 22% pada 2020, 20% pada 2021, 22% pada 2022, dan 20% pada 2023.

Khusus bagi perusahaan yang akan *go public*, mendapatkan tambahan diskon pengurangan tarif PPh badan sebesar 3% selama lima

tahun sesudah *go public*. Adapun insentif bagi investor, pemerintah bakal membebaskan tarif PPh dividen dalam negeri.

Sementara untuk instrumen obligasi, per 6 November 2019 tercatat sudah ada 14 obligasi dari 13 perusahaan yang tercatat dalam *pipeline* BEI dan siap diterbitkan dengan nilai mencapai Rp18,22 triliun.

Dari produk investasi reksa dana ETF, terdapat lima produk yang akan dicatatkan di lantai bursa pada sisa bulan 2019. Dengan demikian, *pipeline* ETF tersebut akan menggenapi jumlah penerbitan ETF pada tahun ini menjadi 17 produk atau lebih banyak dari tahun lalu yang hanya 10 produk.

Produk investasi lain yang sudah tercatat diterbitkan sejak awal tahun ini adalah satu produk DINFRA, tiga produk DIRE, dan 14 produk EBA.

Wisnu Widodo, Direktur Victoria Sekuritas Indonesia menyatakan bahwa realisasi IPO pada tahun ini patut diapresiasi karena terjadi di tengah tekanan ketidakpastian global terutama perang dagang AS dan China.

“Tahun ini orang melihat bahwa industri sedikit *stuck*, tapi perusahaan tetap meminta masuk pasar modal meski suasana sedang *challenging*,” ujarnya.

Dengan kondisi pasar global dan domestik yang belum kondusif, *Head of Research* Institusi MNC Sekuritas Thendra Crisnanda menilai *pipeline* 38 calon emiten berpotensi sulit terealisasi semua. Sejak awal tahun hingga 18 November 2019, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah tergerus sebesar 1,16%.

### Stabilitas IKNB Terjaga

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai, di sektor jasa keuangan nonbank, industri mampu menunjukkan tren pertumbuhan aset, di tengah tekanan perekonomian global serta sejumlah problematika internal.



Data statistik OJK menunjukkan bahwa aset Industri Keuangan Non Bank (IKNB) secara akumulasi sampai dengan kuartal III/2019 mampu tetap tumbuh 8,32% (*year on year/yoy*). Total aset IKNB per kuartal III/2018 mencapai Rp2.311,09 triliun, tumbuh menjadi Rp2.503,39 triliun pada kuartal III/2019.

Hampir setiap sektor di IKNB mampu membukukan pertumbuhan. Sektor asuransi misalnya, dari sisi aset bertumbuh 9,59% (*yoy*) dari Rp1.216,93 triliun per kuartal III/2018 menjadi Rp1.333,68 pada kuartal III/2019.

Aset lembaga pembiayaan bertumbuh 3,95% (*yoy*) dari Rp593,69 triliun (kuartal III/2018) menjadi Rp617,16 (kuartal III/2019). Kemudian, aset dana pensiun naik 8,30% (*yoy*) dari Rp266,69 triliun (kuartal III/2018) menjadi Rp288,83 triliun (kuartal III/2019).

Lembaga Keuangan Khusus (LKK) justru mampu membukukan pertumbuhan dua digit, sebesar 10,70% (*yoy*) dari Rp224,14 triliun (kuartal III/2018) menjadi Rp248,13 triliun (kuartal III/2019). Lalu, industri jasa penunjang sektor-sektor di IKNB membukukan kenaikan aset 33,85% (*yoy*) dari Rp8,98 triliun menjadi Rp12,02 triliun. Sektor lembaga keuangan mikro mencatatkan kenaikan aset dari Rp0,65 triliun pada kuartal III/2018

menjadi Rp0,92 triliun pada kuartal III/2019, melompat 41,53%.

Data OJK juga mencatatkan aset dari industri baru, yakni teknologi finansial atau *financial technology (fintech)* senilai Rp2,65 triliun per kuartal III/2019, dari sebelumnya belum tercatat.

Izzudin Al Farra, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengungkapkan bahwa kehadiran tekfin berkontribusi Rp60,07 triliun terhadap PDB pada 2019. Kontribusi itu melonjak dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp25,97 triliun terhadap PDB.

Indef pun memperkirakan kontribusi tekfin terhadap PDB dapat mencapai lebih dari Rp100 triliun pada tahun depan. “Dengan peningkatan lebih dari dua kali lipat tersebut, dengan asumsi juga perkembangan dari akun *borrower* dan jumlah penyaluran *fintech* sama dalam setahun terakhir, PDB tahun depan bisa lebih tinggi,” ujar Farras, Senin, 11 November 2019.

Sementara Deputy Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank II Otoritas Jasa Keuangan (IKNB II OJK) Moch. Ichsanuddin mengungkapkan, OJK tengah menunggu Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (RBLJKNB) dari perusahaan hingga 30 November 2019 untuk menentukan *outlook* industri pada tahun depan.

Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) wajib menyampaikan laporan realisasi rencana bisnis secara semesteran kepada OJK. Lembaga itu juga wajib menyampaikan laporan pengawasan rencana bisnis secara semesteran kepada OJK.

Selain itu, ada juga kewajiban menyampaikan rencana bisnis, penyesuaian rencana bisnis, perubahan rencana bisnis, laporan realisasi rencana bisnis, dan laporan pengawasan rencana bisnis disampaikan oleh LJKNB kepada OJK secara *online* melalui sistem jaringan komunikasi data OJK.

Di tengah situasi ekonomi global yang dinamis, Indonesia masih mampu mencatat arus modal masuk yang positif, baik di pasar saham maupun obligasi.

OJK senantiasa memantau dinamika perkembangan ekonomi global dan berupaya memitigasi dampak kondisi yang tidak mendukung ini terhadap kinerja sektor jasa keuangan domestik terutama terkait dengan profil risiko likuiditas dan risiko kredit.

Selain itu, OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan para *stakeholder* untuk memitigasi ketidakpastian eksternal yang cukup tinggi, menjaga kontribusi sektor jasa keuangan dalam pembangunan, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. ●

**Airlangga Hartarto**  
**Menko Perekonomian**

# Komitmen Memberi Insentif Fiskal dan Perbaikan

Laju ekonomi dan pasar keuangan domestik saat ini dan 2020 masih dihadapkan pada tantangan ketidakpastian ekonomi global. Tentu faktor tersebut berpotensi memengaruhi pencapaian target-target makroekonomi pemerintah dan stabilitas pasar keuangan. Bagaimana upaya pemerintah untuk mengatasi tantangan tersebut? Berikut wawancara dengan **Menko Perekonomian Airlangga Hartarto**:

## **Pertumbuhan ekonomi pada 2019 diproyeksikan tidak mencapai 5,2%. Apa upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi setidaknya di atas 5,0%?**

Pemerintah yakin bahwa pada 2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di angka sekitar 5,05%. Ekspektasi itu didasari oleh upaya-upaya yang dilakukan selama 2019.

Realisasi belanja pemerintah juga akan meningkat pada akhir tahun, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan konsumsi masyarakat pada akhir tahun.

Untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat, sejak awal tahun, selain menjaga volatilitas tingkat inflasi bulanan dan realisasi tahunan pada kisaran sasaran, pemerintah tetap mengalokasikan dan merealisasikan anggaran untuk subsidi tepat sasaran dan bantuan sosial

## **Bagaimana dengan 2020?**

Pemerintah optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 akan mencapai 5,3%.

Optimisme itu didukung oleh beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan investasi,



mendukung ekspor, dan mendukung substitusi impor yang juga didukung kebijakan fiskal ekspansif melalui beberapa program prioritas yang ditetapkan oleh Presiden.

Upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat tertuang dalam target sasaran inflasi yang lebih rendah di 2020, yaitu 3% ±1%. Upaya itu juga didukung oleh pemberian bantuan sosial melalui Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi dilakukan

melalui penyederhanaan regulasi yang nantinya akan tertuang dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Pemberdayaan UMKM yang segera akan dikeluarkan dan diharapkan dapat mendatangkan investasi yang lebih banyak ke Indonesia.

Selain itu, Presiden RI juga telah mengarahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk terus fokus dalam meningkatkan ekspor dan investasi sekaligus menciptakan substitusi impor.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memiliki strategi



dalam mewujudkan mandat tersebut. *Pertama* adalah dengan memperluas pasar ekspor dengan perjanjian perdagangan bersama Eropa, Afrika, ASEAN, serta enam negara lainnya (Tiongkok, Jepang, Korsel, India, Australia, dan Selandia Baru).

*Kedua*, mendorong Transformasi Ekonomi melalui pengembangan industri dari hulu hingga hilir sebagai upaya substitusi impor dan juga meningkatkan nilai tambah untuk ekspor.

Upaya-upaya tersebut juga masih didukung kebijakan fiskal ekspansif yang ditetapkan dalam UU APBN tahun 2020, yaitu sebesar 1,76% dari PDB. Pengeluaran pada 2020 juga diarahkan kepada kegiatan produktif, yakni pemberian insentif untuk kegiatan produktif dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

### **Bagaimana pemerintah mengatasi masalah defisit transaksi berjalan?**

Secara musiman, impor migas cenderung lebih tinggi pada kuartal IV dibandingkan dengan kuartal-kuartal sebelumnya. Setelah pemerintah memberlakukan kebijakan B20 pada 2018, impor migas pada kuartal IV/2018 cenderung menurun dibandingkan dengan Kuartal IV/2017.

Dengan ini dapat dipastikan bahwa pada Kuartal IV/2019 nanti, impor migas juga akan lebih rendah. Pemerintah melalui Kementerian

ESDM pun telah menyatakan untuk tidak menambah kuota impor migas pada 2019.

Selanjutnya, pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga dan mengendalikan impor migas melalui program peningkatan kebijakan B20 menjadi B30 pada 2020. Kebijakan itu akan menghemat devisa negara sebesar US\$5 miliar.

### **Bagaimana langkah pemerintah untuk menekan repatriasi dividen?**

Defisit neraca pendapatan primer merupakan salah satu implikasi dari realisasi investasi yang saat ini sedang kita tingkatkan. Ketika terjadi aliran investasi asing masuk ke Indonesia, maka kita harus membayarkan *return* dari investasi itu dan tercatat dalam neraca pendapatan primer.

Sebagai negara yang menganut sistem devisa bebas kita juga tidak bisa melarang hasil investasi yang dialirkan ke luar, kebebasan ini juga dalam rangka menjaga iklim investasi untuk dapat meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, karena jika terjadi kontrol devisa, pasar akan meresponnya secara negatif sehingga tidak akan tertarik lagi untuk melakukan investasi.

Dalam rangka mendorong penanaman modal kembali atas dividen investasi, pemerintah terus meningkatkan iklim investasi dengan pemberian insentif baik fiskal maupun non fiskal.

### **Apa upaya pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah?**

Pemerintah dan Bank Indonesia selaku bank sentral pun akan senantiasa bekerja sama menjaga nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental dan serta bersama-sama memitigasi potensi gangguan eksternal yang dapat memengaruhi nilai tukar.

Pemerintah akan terus berupaya untuk mengelola defisit Transaksi Berjalan Indonesia dengan

memperbaiki neraca jasa melalui peningkatan Jasa Pariwisata, melakukan perbaikan pada neraca migas melalui kebijakan substitusi impor, meningkatkan Investasi Langsung dari Luar Negeri yang dapat mendorong industri pengolahan dalam meningkatkan ekspor. Peningkatan ekspor tersebut dapat memperbaiki neraca perdagangan barang.

Pada sektor keuangan, pemerintah beserta segenap otoritas terkait terus melakukan koordinasi untuk mendorong pendalaman pasar keuangan dengan memperkaya instrumen keuangan yang pada akhirnya dapat memperbaiki transaksi modal dan finansial.

### **Langkah apa yang disiapkan untuk mencegah *sudden capital outflow* di tengah instabilitas global?**

Pemerintah dapat memanfaatkan jaring pengaman regional (*Chiang Mai Initiative*) sebagai alternatif untuk mendapatkan devisa dalam menghadapi masalah likuiditas. Jaring Pengaman Regional tersebut dilakukan melalui *Bilateral Swap Arrangement* (BSA).

Selain itu, pemerintah bersama DPR juga akan menerbitkan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dapat membantu perbaikan iklim investasi dan meningkatkan minat investor luar negeri untuk menanamkan modalnya. Iklim investasi yang baik juga dapat mendorong investasi ke sektor riil.

Investasi ke sektor riil juga merupakan salah satu upaya pencegahan *sudden capital outflow* dan memberikan kontribusi pada penyerapan tenaga kerja. Hal ini didukung oleh predikat Indonesia yang tercatat sebagai negara layak investasi dengan kategori risiko rendah.

Selain itu, pemerintah tetap berkomitmen memberikan insentif fiskal dan perbaikan untuk menunjang kemudahan berusaha. ●



# Mempertahankan Kestabilan Pasar

Meski di bawah tekanan dan bayang-bayang gejolak ekonomi global, kondisi pasar keuangan Indonesia tercatat relatif stabil dan terjaga.

Hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang digelar pada Kamis, 31 Oktober 2019 di gedung Bank Indonesia menyatakan bahwa kondisi stabilitas keuangan pada kuartal III/2019 tetap terkendali di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global.

Ketidakpastian ini masih dipengaruhi oleh ketegangan hubungan dagang AS-China, meskipun pada Oktober 2019 sedikit mereda.

Berlarutnya perang dagang ini menyebabkan penurunan volume perdagangan dan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia diikuti oleh melemahnya harga komoditas dan tekanan inflasi. Berbagai negara merespons perkembangan ini dengan melonggarkan kebijakan moneter dan memberikan stimulus fiskal, yang kemudian mendorong masuknya aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia.

Rapat KSSK dihadiri oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS). Dalam rapat ini, KSSK membahas agenda utama, yaitu asesmen kondisi stabilitas sistem keuangan kuartal III/2019.

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi masih tetap baik meskipun kontraksi kinerja ekspor perlu mendapat perhatian karena berdampak pada kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada kuartal III/2019 tercatat membaik dengan defisit yang mengecil menjadi US\$46 juta, jauh lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada kuartal sebelumnya sebesar US\$2,0 miliar.

Perbaikan ini ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat. Peningkatan surplus transaksi modal dan finansial terutama didukung oleh membaiknya kinerja investasi portofolio, seiring dengan meningkatnya aliran masuk modal asing pada aset keuangan domestik.

Menurut Deputy Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo, aliran

modal asing (*capital inflow*) sejak Januari hingga awal November 2019 telah mencapai Rp226,7 triliun yang tersebar ke dalam instrumen Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp175 triliun, saham Rp49 triliun, dan instrumen lain (obligasi korporasi) sebesar Rp2,7 triliun.

“Itu gambaran *overall* sehingga terlihat positifnya muncul, dan investor masih positif melihat Indonesia,” kata Dody, Jumat, 8 November 2019.

Sejalan dengan membaiknya NPI, defisit neraca pembayaran Indonesia juga mengecil menjadi US\$7,7 miliar atau 2,7% dari PDB, lebih rendah dibandingkan dengan defisit pada kuartal sebelumnya yang mencapai US\$8,2 miliar atau 2,9% dari PDB.

Adapun posisi cadangan devisa pada akhir Oktober 2019 tercatat meningkat menjadi US\$126,7 miliar dari bulan sebelumnya sebesar US\$124,3 miliar. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,4 bulan impor atau 7,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta

berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

BI menilai posisi cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

Sementara itu dari sisi makro ekonomi, laju inflasi hingga kuartal III/2019 tercatat terkendali pada level yang rendah dan stabil di dalam target 3,5%+1%.

Ketahanan ekonomi yang terjaga pada gilirannya mendukung stabilitas sistem keuangan. Pertumbuhan ekonomi kuartal III/2019 tercatat sebesar 5,02% secara tahunan dan secara kumulatif tumbuh 5,04%.

## Ketahanan Perbankan

Stabilitas sistem keuangan yang terkendali didukung oleh ketahanan perbankan yang terjaga, likuiditas yang memadai, serta pasar uang yang stabil. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) yang tinggi dan risiko kredit bermasalah (*Non Performing Loan/NPL*) yang tetap rendah.

Koordinasi kebijakan KSSK yang terus diperkuat berdampak positif pada stabilitas sistem keuangan yang tetap baik. Koordinasi kebijakan diarahkan untuk mempertahankan stabilitas sistem keuangan sehingga tetap mendorong momentum pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.

Selain itu, sinergi kebijakan juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan eksternal melalui berbagai upaya meningkatkan ekspor barang dan jasa, serta menarik aliran masuk modal asing, termasuk penanaman modal asing.

BI memperkuat bauran kebijakan akomodatif dengan menurunkan suku bunga kebijakan BI *7-day Reverse Repo Rate* (BI7DRR) sebesar 100 bps sejak Juli hingga Oktober 2019. Hal ini sejalan dengan prakiraan inflasi yang terkendali dan imbal hasil investasi keuangan domestik yang

tetap menarik, serta sebagai langkah *pre-emptive* untuk mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik di tengah kondisi ekonomi global yang melambat.

BI juga melakukan sejumlah relaksasi kebijakan makroprudensial. Selain itu, kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan juga terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka mendorong momentum pertumbuhan ekonomi domestik, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas belanja dan menjaga pelaksanaan program-program prioritas agar APBN mampu memberikan daya dorong yang optimal bagi perekonomian.

Untuk melengkapi insentif fiskal dan moneter, OJK akan terus mengoptimalkan kontribusi sektor jasa keuangan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan ketahanan sektor jasa keuangan.

OJK akan terus memantau transmisi kebijakan moneter di pasar dan lembaga jasa keuangan, di mana saat ini suku bunga telah berada dalam tren yang menurun. Upaya lainnya dilakukan dengan mempertajam kebijakan dan insentif yang telah dikeluarkan dalam rangka pendalaman pasar keuangan, peningkatan akses keuangan, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, serta mendukung upaya pembiayaan pada sektor produktif yang prospektif dengan tetap memperhatikan aspek prudensial.

Di sisi lain, OJK juga terus melakukan penyempurnaan pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan. Ke depan, OJK akan senantiasa memantau dinamika perekonomian global dan berupaya memitigasi dampaknya terhadap kinerja sektor jasa keuangan dengan mengeluarkan langkah-langkah dan kebijakan yang dibutuhkan pasar secara tepat waktu dan terukur.

Kondisi politik yang mulai teduh dan pengumuman susunan Kabinet Indonesia Maju turut menambah optimisme pasar dalam mengakhiri tahun 2019 dan menapaki 2020. Pengumuman personil pembantu Presiden Joko Widodo tersebut membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,52% ke level 6.257 pada akhir perdagangan Rabu (23/10/2019), sekaligus memperpanjang reli yang telah terjadi selama sembilan hari berturut-turut.

Presiden Direktur Bahana TCW *Investment Management* Edward Lubis mengatakan, prospek pasar saham masih akan positif karena pelaku pasar terlalu lama berada pada posisi *wait and see* pada saat Pemilu berlangsung hingga pelantikan presiden dan wakil presiden.

Menurutnya, tantangan pemerintah ke depan adalah bagaimana mengangkat pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang ditetapkan karena faktor ini menjadi dasar untuk melihat prospek investasi di pasar modal. Laju ekonomi yang tumbuh kencang tentu akan berdampak positif terhadap pergerakan saham-saham di lantai bursa, begitu pula sebaliknya.

Direktor Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Laksono Widodo mengatakan, pergerakan pasar ke depan akan bergantung pada gebrakan dan langkah konkrit yang akan diambil oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Saya rasa dari nama-nama yang ada itu dapat diterima oleh pelaku pasar. Mungkin perlu waktu karena dari menteri ini yang mungkin baru di posisinya, butuh penyesuaian," ujarnya.

Selain gebrakan skuad Kabinet Indonesia Maju, Direktur Aurora AM Manuel M. Maleaki menilai arah pergerakan bursa saham hingga akhir tahun juga bergantung dari laporan kinerja emiten kuartal III/2019. ●

# Intermediasi Perbankan Tersendat

Dalam 4 bulan tahun ini, Bank Indonesia agresif memangkas suku bunga acuan atau BI-7 Day (*Reverse*) *Repo Rate* sebesar 25 basis poin per bulan sejak Juli 2019 menjadi 5% per Oktober 2019.

Langkah agresif itu tertahan pada November 2019. Bank sentral mempertahankan suku bunga acuan tetap 5%. Namun, otoritas moneter memangkas giro wajib minimum (GWM) sebesar 50 bps yang berlaku mulai 2 Januari 2020.

Bank sentral berusaha keras membalikkan keadaan. Membalikkan keadaan dari tahun sebelumnya mendorong kenaikan suku bunga acuan sebesar 175 bps dalam 7 bulan (Mei-November 2019) menjadi 6%.

Kenaikan suku bunga pada tahun lalu masih terasa hingga tahun ini. Bahkan, meski telah dikompensasi penurunan bunga 100 bps.

*Pertama*, bukti dari dampak kenaikan bunga acuan pada tahun lalu adalah pengetatan likuiditas.

Bank masih bersaing dalam mengamankan likuiditas, meskipun kondisi itu dinilai mulai melonggar. Namun, laju penghimpunan dana pihak ketiga masih berjalan lamban.

Hingga September 2019 pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan sebesar 7,47% secara *year-on-year*. Angka ini sedikit membaik dibandingkan dengan posisi September 2018 yang sebesar 6,6% *yoy*.

Akan tetapi, perbaikan laju pertumbuhan itu belum mampu meredam tensi perang suku bunga antarbank. Akibatnya transmisi kebijakan moneter terhadap penurunan suku bunga kredit berjalan lamban karena beban biaya yang dikeluarkan bank cukup tinggi.

Hal itu mempengaruhi penyaluran kredit perbankan. Likuiditas yang terbatas membuat bank menahan ekspansi. Tahun ini memang terasa berat bagi industri perbankan nasional. Tahun ini bisa dikatakan mirip 2016. Kala itu penyaluran kredit oleh bank melambat signifikan.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan kredit hanya sebesar 7,9% secara tahunan (*year-on-year/yoy*) menjadi Rp4.413,4 triliun. Padahal tahun sebelumnya, 2015, bank membukukan pertumbuhan kredit 10,4% *yoy*.

Kondisi sebenarnya mulai membaik pada Mei 2018, di mana pertumbuhan kredit bank kembali menyentuh dua digit, atau menjadi 10,5% *yoy*. Namun, hal itu tidak





berlangsung lama, karena per Juni 2019 laju kredit tertahan dan akhirnya harus puas dengan pertumbuhan 9,9% *yoy*.

Hingga akhirnya per September 2019, OJK mencatat penyaluran dana hanya naik kurang dari 8% *yoy*. Padahal pada saat yang sama relaksasi moneter dan makroprudensial telah dilakukan oleh otoritas.

Hal tersebut terlihat dari kebijakan bank sentral menurunkan suku bunga acuan dan GWM yang tahun ini mencapai 100 bps. Selain itu ada relaksasi rasio *loan to value* (LTV) untuk mendorong

**Hingga akhirnya per September 2019, OJK mencatat penyaluran dana hanya naik kurang dari 8% *yoy*. Padahal pada saat yang sama relaksasi moneter dan makroprudensial telah dilakukan oleh otoritas.**

Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan kendaraan, serta pelanggaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

### Pasar Butuh Stimulus

Namun, Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) melihat bahwa ekonomi di dalam negeri tidak hanya membutuhkan kebijakan moneter dan makroprudensial. Pasar membutuhkan lebih dari hal tersebut untuk membuat permintaan kredit kembali menyentuh angka dua digit.

Satu di antara yang menjadi fokus Perbanas adalah memberikan stimulus kepada kredit konsumsi. Wakil Ketua Perbanas Tigor Siahaan mengatakan pemerintah perlu memberikan stimulus melalui instrumen fiskal, guna mendorong daya beli masyarakat.

Lebih jauh, mendorong konsumsi akan menghindari laju pertumbuhan ekonomi domestik yang melambat. “Menaikkan PTKP akan memberi daya beli lebih kepada masyarakat khususnya masyarakat bawah,” kata Tigor dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Saat ini Kementerian Keuangan mematok PTKP sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 juta per tahun. Kementerian terakhir kali menaikkan PTKP pada April 2016 hingga 50% menjadi Rp54 juta per tahun, atau Rp4,5 juta per bulan dari sebelumnya Rp36 juta per tahun atau Rp3 juta per bulan.

Selain kredit konsumsi, Perbanas juga menaruh perhatian pada melambatnya kredit investasi. Indonesia sebagai negara berkembang seharusnya memberikan ruang lebih bagi bank untuk menyalurkan kredit investasi.

Dalam hal ini Perbanas merekomendasikan pemerintah memberikan insentif pajak kepada industri berbasis ekspor. “Juga reformasi birokrasi dan kemudahan perizinan untuk sektor-sektor yang dirasa butuh investasi lebih lanjut,” tambah Tigor.

Selain insentif fiskal, kajian Perbanas juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mempercepat realisasi belanja modal. Hal ini juga akan menjadi satu stimulus kepada roda ekonomi yang akhirnya berimbas pada permintaan kredit baru.

Lazimnya pemerintah merealisasikan belanja pada paruh kedua setiap tahunnya. “Alangkah baiknya sejak kuartal I percepatan belanja pemerintah sudah dilakukan sehingga ada stimulus untuk kemudian meningkatkan bantuan sosial,” ujar dia.

Adapun di luar itu semua Perbanas melihat minimnya keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur. Padahal proyek pembangunan milik pemerintah ini menjadi satu penggerak kredit perbankan dalam dua tahun terakhir. ●

## Bisnis *Fintech*

# Indonesia Jadi Percontohan di ASEAN

Seiring dengan perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat di dunia, Indonesia terkena imbasnya. Bahkan teknologi finansial alias *fintech* di negeri ini turut memunculkan decacorn dan unicorn baru yang dapat mengubah pola transaksi keuangan.

**D**i Indonesia terlihat dari munculnya satu decacorn dan tiga unicorn. Ada juga perkembangan *fintech* di 15 klaster yang terus bertumbuh dari segi jumlah maupun pendanaan.

Belum lagi dengan perkembangan *fintech peer to peer (P2P) lending*, yang berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah *fintech P2P lending* terdaftar sebanyak 127 platform per September 2019, dengan akumulasi penyaluran pinjaman *P2P lending* senilai Rp 60,40 triliun. Nilai ini tumbuh 166,51% secara *year to date (ytd)* dibandingkan dengan Desember 2018 yang sebesar Rp22,66 triliun.

Maka dari itu, Indonesia disebut sebagai negara percontohan dalam perkembangan *fintech* hingga bisa melebarkan sayap ke negara-negara ASEAN. Banyak perusahaan Indonesia di bidang *fintech* sudah keluar ke kawasan ASEAN.

“Bahkan, banyak yang belajar di Indonesia terkait dengan ekosistem *fintech* bisa berkembang dengan baik dan bagaimana caranya dampak negatif bisa di-manage,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta, Selasa (3/9/2019). Untuk terus menjaga perkembangan ini, dia menyatakan, OJK akan terus mengeluarkan kebijakan atau regulasi.

Salah satu regulasi yang akan dibuat dalam waktu dekat adalah Peraturan OJK (POJK) untuk klaster-klaster *fintech* yang belum memiliki aturan. Sebab saat ini, hanya ada dua klaster yang peraturannya telah berdiri sendiri, yaitu *fintech peer to peer (P2P) lending* dalam POJK 77 Tahun 2017 dan *fintech equity crowdfunding* dalam POJK 37 Tahun 2018.

Selain regulasi, kata Wimboh, OJK juga mulai menerapkan *Supervisory Technology (SupTech)* dengan membentuk mini portal untuk memudahkan



*fintech* melakukan pencatatan maupun pendaftaran ke OJK. “Dengan adanya *minisite* ini, kita juga akan lebih mudah melakukan pencatatan dan pengawasan karena sudah secara elektronik,” jelasnya.

Sebelumnya, OJK juga telah mendirikan *Innovation Center* atau *Fintech Center* (OJK Infinity) sebagai wadah diskusi maupun kolaborasi bagi para pelaku industri *fintech*. Per Juli 2019, OJK Infinity telah melayani 397 konsultasi dan menerima lebih dari 800 pengunjung.

### Tertinggi di Asia

Saat ini, Indonesia terpantau menjadi lokasi yang seksi bagi pertumbuhan ekonomi digital. Berdasarkan laporan Temasek, ekonomi digital Indonesia tahun ini mencetak US\$40 miliar atau sekitar Rp556,6 triliun (US\$1=Rp14.166).

Angka pertumbuhan ekonomi digital merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara tahun ini, mengalahkan Thailand (US\$16 miliar), Singapura (US\$12 miliar), Vietnam (Rp12 miliar), Malaysia (US\$11 miliar), dan Filipina (US\$7 miliar). Pada tahun 2025, ekonomi digital Indonesia pun akan terus meroket hingga US\$133 miliar. Angka itu jauh di atas *runner-up* di ASEAN, yakni Thailand dengan

ekonomi digital sebesar US\$50 miliar di tahun 2025.

Sementara itu, pertumbuhan pesat perusahaan *fintech* di seluruh Asia selama lima tahun terakhir didorong oleh banyak faktor, mulai dari kemajuan teknologi, tingkat penetrasi internet. Selain itu kian banyaknya jumlah orang yang melek finansial juga menuntut adanya layanan keuangan yang lebih baik.

Dikutip dari *Entrepreneur.com*, Senin (7/10/2019), sebuah studi yang dilakukan Google, Temasek dan Bain & Co baru-baru ini menunjukkan bahwa pembayaran digital di Asia yang mencakup layanan transfer dan dompet elektronik, telah mencapai titik belok (*inflection point*), sebuah titik di mana perubahan dramatis akan segera terjadi.

Dengan pertumbuhan dua digit, nilai pembayaran digital diperkirakan akan tembus US\$1 triliun pada tahun 2025. Pasar untuk *e-wallet* diperkirakan akan tumbuh lebih cepat, dari US\$22 miliar pada tahun 2019 menjadi US\$114 miliar, naik lebih dari lima kali lipat pada 2025.

Selain dari para pelaku bisnis keuangan perbankan, asuransi, perusahaan pengiriman uang, dunia *fintech* di Asia juga mendapat perhatian yang cukup besar dari

pelaku industri *e-commerce*, *fintech game*, *platform* media sosial, serta perusahaan transportasi *online*. Beberapa pelaku usaha yang hanya fokus pada layanan keuangan *online*, seperti aplikasi pembayaran Momo di Vietnam, layanan manajemen kekayaan digital Stashaway, serta pemberi pinjaman digital di Indonesia Akulaku. Mereka menavigasi beberapa poin seperti akses, kemudahan, dan transparansi dalam penyediaan layanan keuangan.

Di lain pihak, perusahaan lain seperti Lazada, Gojek, Grab dan Sea Group memiliki *leg-up* di *fintech* murni karena mereka sudah memiliki basis pelanggan yang mapan sehingga hambatanannya lebih sedikit. Mereka bermitra dengan perusahaan keuangan tradisional untuk menawarkan layanan seperti asuransi dan pinjaman, bersama dengan pembayaran digital.

Studi tersebut menyebutkan dari 400 juta orang dewasa di Asia Tenggara, setidaknya ada 198 juta orang yang masuk kategori *unbanked*, bahkan belum memiliki rekening. Dengan jumlah populasi *unbanked* yang belum mampu mengakses layanan keuangan formal, perusahaan *fintech* memiliki potensi yang besar untuk bertumbuh di Asia Tenggara. ●

# Menanti Emiten Baru dari Anak BUMN

Setelah absen pada tahun ini, anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan mengeksekusi rencana penawaran umum perdana (*Initial Public Offering/IPO*) saham pada tahun depan.

Sejak 2013, tercatat sudah 11 anak usaha BUMN yang mencatatkan sahamnya (*listing*) di lantai Bursa Efek Indonesia. Ke-11 anak usaha BUMN tersebut adalah *pertama*, PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. (AGRO) yang *go public* pada 8 Agustus 2003. Per 15 November, harga saham AGRO tercatat Rp192 per lembar saham atau naik dibandingkan dengan harga saat IPO sebesar Rp100.

*Kedua*, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) yang IPO pada 28 Mei 2018 dengan harga Rp3.850. Per 15 November, harga sahamnya tercatat Rp3.450. *Ketiga*,

PT Bank BRISyariah Tbk. (BRIS) yang IPO pada 9 Mei 2018 pada harga Rp510. Per 15 November harga sahamnya tercatat Rp372.

*Keempat*, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE) yang IPO pada 30 November 2017 pada harga Rp290. Per 15 November, harga sahamnya tercatat Rp308.

*Kelima*, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. yang IPO pada 10 Oktober 2017 pada harga Rp400.

Per 15 November, harga saham emiten berkode GMFI itu tercatat Rp167.

*Keenam*, PT Jasa Armada Indonesia Tbk. (IPCM) yang IPO pada 22 Desember 2017 pada harga Rp380. Per 15 November, harga

saham anak usaha PT Pelindo II (Persero) itu tercatat Rp195.

*Ketujuh*, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) yang IPO pada 9 Juli 2018 dengan harga Rp1.640. Per 15 November, harga saham emiten anak usaha PT Pelindo II (Persero) itu tercatat Rp725.

*Kedelapan*, PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON) yang IPO pada 8 April 2014 pada harga Rp590. Per 15 November, harga saham anak usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. itu tercatat Rp420.

*Kesembilan*, PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) yang IPO pada 20 September 2016 pada harga Rp490. Per 15 November, harga



saham anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk. itu tercatat Rp324. *Kesepuluh*, PT PP Properti Tbk. (PPRO) yang IPO pada 19 Mei 2015 pada harga Rp185. Per 15 November, harga saham anak usaha PT PP (Persero) Tbk. itu tercatat Rp95. *Kesebelas*, PT PP Presisi Tbk. yang IPO pada 24 November 2017 pada harga Rp430. Per 15 November, harga saham anak usaha PT PP (Persero) Tbk. itu tercatat Rp248.

Dari 11 anak usaha BUMN tersebut, tercatat hanya dua emiten yang sahamnya meningkat dibandingkan dengan harga saham pada saat IPO. Penurunan mayoritas saham anak usaha BUMN tersebut sebenarnya menjadi momentum yang baik bagi investor untuk membeli saham-saham anak usaha BUMN karena valuasinya yang murah.

Terlebih, kepemilikan saham oleh BUMN menjadi nilai tambah tersendiri karena memiliki hubungan afiliasi dengan pemerintah.

Untuk tahun depan, tercatat lima anak usaha BUMN di sektor konstruksi dan properti yang bersiap menggelar IPO. *Pertama*, PT Wijaya Karya Realty yang bergerak di bisnis *realty, developer*, manajemen properti, dan jasa konstruksi. IPO anak usaha Wijaya Karya yang awalnya ditargetkan pada 2018 tersebut ditargetkan pada semester I/2020. IPO ini ditargetkan melepas 25% saham ke publik dengan target perolehan dana sebesar Rp1,5 triliun-Rp2,5 triliun.

*Kedua*, PT Wika Industri & Konstruksi yang bergerak di bisnis konstruksi dan perdagangan. IPO anak usaha Wijaya Karya yang awalnya disiapkan pada 2019 tersebut

direncanakan pada semester I/2020. IPO ini ditargetkan melepas 20%-30% saham ke publik dengan target dana Rp1,2 triliun-Rp1,8 triliun.

*Ketiga*, PT PP Infrastruktur yang merupakan anak usaha dari PT PP Tbk. Awalnya, IPO PP Infrastruktur ditargetkan pada tahun ini, tetapi ditunda karena situasi pasar yang dinilai tidak mendukung. PTPP menargetkan dana sebesar Rp2,5 triliun-Rp3 triliun dari aksi korporasi ini.

*Keempat*, PT Adhi Persada Gedung yang merupakan anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk. Rencana IPO yang tertunda sejak 2018 tersebut dikabarkan akan melepas 30%-40% saham ke publik dengan target perolehan dana Rp1 triliun-Rp1,5 triliun.

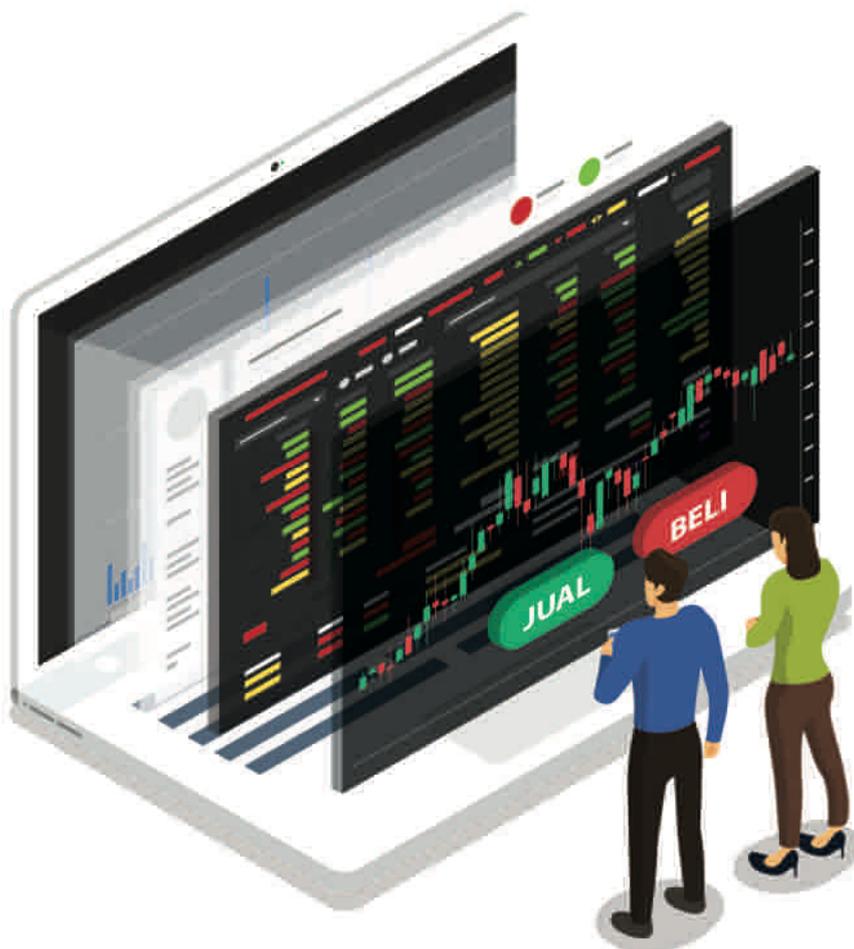
*Kelima*, PT Adhi Commuter Properti yang juga merupakan anak usaha Adhi Karya. IPO yang awalnya direncanakan pada tahun ini tersebut bakal melepas sekitar 30% saham ke publik dengan target perolehan dana sebesar Rp2 triliun-Rp2,5 triliun.

Menurut analis Artha Sekuritas Indonesia Dennies Christoper Jordan, kendala IPO anak usaha BUMN pada tahun ini adalah tekanan yang berasal dari perang dagang, perlambatan ekonomi global, Brexit, dan kebijakan suku bunga The Fed. Berbagai sentimen tersebut membuat situasi pasar modal menjadi tidak menentu sehingga tidak tepat untuk melakukan IPO.

“Untuk tahun depan saya belum bisa pastikan apakah sentimen-sentimen tersebut masih akan menekan pasar modal. Kalau tahun depan kondisi pasarnya baik, tentu akan bagus,” jelasnya.

Semoga saja kondisi ekonomi global membaik pada tahun depan dan memberikan sentimen positif terhadap pasar modal dalam negeri, sehingga rencana IPO sejumlah anak usaha BUMN bisa terlaksana pada tahun depan.

Bergabungnya perusahaan anak usaha BUMN ini diharapkan makin menambah daya pikat pasar saham Tanah Air, khususnya investor ritel. ●



# Rivalitas Perbankan, Antara *Fintech* dan Alih Teknologi

Perusahaan teknologi finansial berlomba-lomba menawarkan biaya transfer gratis antar bank untuk menggaet konsumen. Model tersebut cukup menarik simpatik para konsumen untuk menggunakan aplikasi *financial technology*.

Bagaimana dengan bisnis bank yang selama ini masih menerapkan biaya transfer antarbank? Padahal saat ini, transfer antar bank yang dilakukan dengan layanan eksisting bank umumnya dibebankan biaya sekitar Rp6.500.

Beberapa bankir masih percaya diri bahwa bisnis perusahaan teknologi finansial (tekfin) yang menawarkan transfer antarbank secara gratis belum mengusik pendapatan berbasis komisi atau *fee based income* bank.

Bank juga mengklaim kebijakan pemangkasan biaya layanan transfer dana nasabah melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dari Rp5.000 menjadi Rp3.500 per transaksi juga belum berpengaruh.

Kebijakan tersebut sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga PBI No. 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (BI) yang berlaku sejak 24 Mei 2019. Aturan ini juga telah berlaku sejak 1 September 2019.

Direktur Teknologi Informasi dan Operasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dadang Setiabudi mengatakan bahwa perseroan akan banyak berinovasi untuk menghadapi persaingan ini. "Sejauh ini *fee base income* (FBI) kami justru meningkat 13% secara tahunan menjadi Rp8,2 triliun per September 2019," ujarnya saat dihubungi, baru-baru ini.

Direktur Bisnis PT Bank Mayapada Tbk. Andreas Wiryanto menyampaikan, hadirnya tekfin memang sedikit berpengaruh pada capaian pendapatan komisi bank. Namun, secara umum nasabah masih cenderung melakukan transaksi via perbankan karena mempertimbangkan unsur kepercayaan dan relasi, serta keamanan. “Layanan gratis transfer oleh tekfin sedikit banyak ada pengaruh tetapi belum besar,” katanya, belum lama ini.

Sementara Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Haru Koesmahargo menuturkan bahwa keberadaan perusahaan tekfin bukan menjadi tantangan bagi perseroan, sehingga tidak akan mengancam FBI perseroan.

Namun, menurut Haru, perusahaan tekfin harus mendapatkan izin dari regulator dan tidak hanya proses registrasi untuk dapat melayani transaksi keuangan.

Departemen Komunikasi Bank Indonesia Onny Widjanarko pun menegaskan syarat pertama untuk memanfaatkan layanan tekfin adalah memastikan tekfin tersebut sudah memiliki izin transfer dana dari Bank Indonesia agar dana terjamin dan transaksi dilakukan secara aman. “Terkait dengan biaya transfer tidak terdapat aturan BI yang mengatur hal tersebut. Jadi, karena tidak diatur maka pengenaan biayanya harus wajar,” ujar Onny saat dihubungi.

## Perkembangan Teknologi

Satu sisi, perkembangan teknologi membawa perubahan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, termasuk industri jasa keuangan yang tak dapat menghindari gejolak gelombang transformasi digital.

Semakin berkembangnya inovasi digital dan hadirnya beragam alat pembayaran semakin menumbuhkan kesadaran dan mendorong penggunaan pembayaran non tunai di tengah masyarakat yang semakin *digital savvy* atau cerdas digital.

Merujuk pada data Bank Indonesia, transaksi tarik tunai melalui bank umum mengalami penurunan dari 11,06% menjadi 3,32% secara tahunan (*year-on-year/yoy*) per September 2019. Di samping itu, transaksi melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) juga mengalami penurunan, yang pertumbuhan volume dan transaksinya masing-masing tercatat turun dari 13,18% dan 13,50% *yoy* menjadi 8,45% dan 4,33% *yoy*.

Direktur *Consumer Banking* PT Bank CIMB Niaga Tbk. Lani Darmawan mengatakan, tren penggunaan non tunai semakin tinggi hingga saat ini, tercermin dari sekitar 98% nasabah perseroan bertransaksi sudah secara digital. Peningkatan itu pun menurutnya tak terlepas dari peran gaya hidup milenial.

“Nasabah individual CIMB Niaga saat ini sudah 98% bertransaksi di luar cabang, termasuk melalui mesin ATM dan CDM. Pertumbuhan transaksi terbesar dari digital lewat *e-channel mobile banking*, yaitu *Go-mobile*,” katanya saat dihubungi, Rabu (20/11/2019).

PT Bank Central Asia Tbk. juga mencatat peningkatan nilai transaksi yang signifikan pada *e-channel* seperti *m-banking* dan *i-banking*, masing-masingnya naik 51,7% dan 17,2% *yoy* per September 2019.

Sementara itu, terjadi penurunan pada transaksi di kantor cabang, yakni turun 2,5% *yoy* dan transaksi di mesin ATM BCA tercatat stagnan.

Direktur BCA Santoso Liem mengakui memang terjadi perubahan transaksi di BCA, tetapi bukan berarti perubahan tersebut negatif. Menurutnya, hal tersebut justru mengindikasikan gerakan non tunai berhasil diterapkan. “Transaksi di cabang makin menurun, sekarang di ATM pun mulai sedikit menurun. Tapi, ini menunjukkan gerakan non tunai berhasil,” tutur Santoso.

## Bank Virtual

Di tengah perkembangan teknologi, Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) tengah melakukan kajian terhadap bentuk bisnis perbankan baru yakni *virtual banking*. Kajian dilakukan setelah beberapa negara sudah mengizinkan perusahaan tekfin memberi jasa keuangan seperti yang dimiliki perbankan. Negara yang telah memberi izin diantaranya Singapura dan Hong Kong.

“Sekarang di beberapa negara sudah mulai otoritas memberi izin tekfin terutama *superapps* agar mereka memberi jasa seperti perbankan juga. Kami sedang mendalami bagaimana ini *virtual banking*,” ujar Deputy Komisioner Pengawas Perbankan OJK Boedi Armanto di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

*Virtual banking* adalah lembaga keuangan yang melayani semua transaksi melalui sistem daring. Layanan yang bisa dilayani lembaga ini sama dengan milik pelaku industri perbankan konvensional, seperti transfer uang, tarik tunai, dan pembayaran beragam hal.

Dikutip dari situs *Bloomberg*, saat ini Singapura menjadi salah satu negara yang telah mengakui keinginannya mengembangkan lebih jauh *virtual banking*. Singapura bahkan menargetkan bisa menjadi pusat regional bagi perusahaan tekfin yang akan membuat *virtual banking*.

Boedi menyebutkan, pelaku industri perbankan di Indonesia harus bersatu atau lebih sering melakukan kolaborasi guna menghadapi perkembangan teknologi dan kemungkinan hadirnya *virtual banking*.

Hal ini harus dilakukan agar perbankan tetap bisa menjalani fungsi utamanya dalam menyalurkan pembiayaan dan melayani masyarakat. “Yang kami inginkan ke depan perbankan ini bersatu, kolaborasi, koordinasi atau yang sifatnya bersama itu lebih baik. Seandainya tak bisa berkompetisi dengan tekfin, yang bagus juga adalah kolaborasi,” ujarnya. ●



## Potensi di Balik Skor Pensiun Indonesia

Usia harapan hidup masyarakat di Indonesia yang meningkat diiringi oleh turunnya indeks pensiun. BPJS Ketenagakerjaan dan pengelola dana pensiun swasta dituntut untuk meningkatkan jumlah dana yang dikelola agar masyarakat mampu mencapai masa pensiun secara layak.

Sebuah laporan tahunan dari Mercer yang berjudul *Melbourne Mercer Global Pension Index* (MMGPI) menunjukkan bahwa skor indeks sistem pensiun Indonesia pada tahun ini berada di level 52,2. Capaian itu turun tipis dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 53,1.

Bill Johnston, Presiden Direktur Mercer Indonesia memaparkan adanya gejala menarik dari menurunnya skor Indonesia pada tahun ini. Pasalnya, penurunan skor itu justru ada kaitannya dengan naiknya usia harapan hidup.

Konsultan global di bidang kesehatan, kesejahteraan dan karir itu mengungkapkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia naik dari 69 tahun menjadi 70 tahun.

Artinya, dengan kenaikan tersebut, ada dana yang juga harus disiapkan untuk satu tahun tambahan harapan hidup. Sementara itu, sistem pensiun di Indonesia saat ini masih memperhitungkan usia harapan hidup yang lama, yakni 69 tahun.

“Semakin lama usia hidup, potensi dana pensiun yang dapat dikelola semakin besar. Dengan sistem di Indonesia sekarang, usia pensiun

naik, ada satu tahun lagi dana yang harus disiapkan di hari tua,” ujar Bill di Kantor Mercer Indonesia, Jakarta pada Senin, 21 Oktober 2019.

Dia menekankan bahwa kondisi tersebut justru membawa potensi untuk pengembangan sistem pensiun di Indonesia. Mercer melihat bahwa Indonesia memiliki beberapa fitur pensiun yang telah berjalan baik.

Namun, masih ada beberapa kekurangan yang perlu dibenahi. Di antaranya adalah pemberian tunjangan minimum untuk penduduk lanjut usia dengan kemampuan

## Indeks Pensiun Indonesia

### Skor indeks sistem pensiun Indonesia:



### Indikator Penilaian:

- **Kecukupan dana:** bobot penilaian 40%  
Misalnya terdiri dari: manfaat, desain sistem pensiun, simpanan, dukungan perpajakan.
- **Keberlanjutan:** 35%  
Total aset, kontribusi, utang pemerintah, pertumbuhan ekonomi.
- **Integritas:** 25%  
Regulasi, tata kelola, komunikasi dengan nasabah, biaya operasional.

Sumber: Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI).

ekonomi rendah dan menaikkan iuran program pensiun.

“Kemudian memperbaiki peraturan sistem pensiun swasta, memperbaiki komunikasi kepada anggota program pensiun dan menaikkan batas usia pensiun sesuai dengan peningkatan usia harapan hidup,” katanya.

Capaian skor indeks pensiun pada tahun ini membawa Indonesia setingkat dengan Italia (52,2), Austria (53,9), Spanyol (54,7), Brasil (55,9) dan Peru (58,5) di tingkat C, yakni kelompok negara dengan skor indeks berkisar 50-60.

Jika dilihat dari tahun ke tahun, terjadi tren peningkatan. Sebagai informasi, saat pertama kali masuk ke dalam MMGPI pada 2013, Indonesia berada di tingkat D di kelompok dengan skor indeks 35 -50. Pada 2013, skor indeks pensiun Indonesia berada di level 42,0 kemudian tumbuh menjadi 45,3 pada 2014.

Namun, terjadi peningkatan secara bertahap terutama sejak sistem jaminan sosial nasional di Indonesia berjalan melalui Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 2015. Pada tahun itu, indeks skor pensiun Indonesia naik signifikan menjadi 48,2, kemudian 48,3 pada 2016, dan 49,9 pada 2017.

Menurut Johnston, sejak hadirnya BPJS Ketenagakerjaan, jumlah masyarakat yang memiliki dana pensiun bertambah. Namun, masih terdapat pekerjaan rumah karena banyak pekerja yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan kerap mengambil seluruh uangnya sekaligus saat memasuki masa pensiun.

Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, meskipun sistem pensiun semakin membaik, Indonesia masih perlu menggenjot sinergi program pensiun publik yang dikelola pihaknya dengan program pensiun swasta.

“Masih diperlukan upaya-upaya untuk mensinergikan program pensiun publik dengan program pensiun privat agar dapat memberikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik di masa yang akan datang,” ujar Agus, Selasa (22/10).

Secara umum, Agus menambahkan, sistem pensiun ditopang oleh tiga faktor utama. *Pertama*, desain dan manfaat yang memadai. *Kedua*, kesinambungan program. *Ketiga*, cakupan perlindungan pensiun.

Dia menilai bahwa program pensiun, mulai dari yang paling dasar, perlu mulai dikenalkan kepada kelompok masyarakat lansia, khususnya yang dari kalangan menengah ke bawah, agar indeks sistem pensiun terus meningkat.

Menurut Bambang Sri Muljadi, Direktur Eksekutif Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), pertumbuhan industri dana pensiun sangat tergantung kepada partisipasi peserta dan pemberi kerja.

Dia menyebutkan salah satu stimulus yang dapat meningkatkan pertumbuhan itu adalah adanya insentif pajak bagi pemilik dana pensiun. Oleh karena itu, ujarnya, regulasi yang tepat dapat mendorong kinerja industri sehingga dapat meningkatkan skor indeks. ●

## Industri Pembiayaan

# Tekanan Masih Membayang

Industri pembiayaan atau *multifinance* masih menghadapi tekanan untuk mendongkrak kinerja bisnis pada tahun ini, seiring dengan kondisi perekonomian yang cenderung melambat.

Hal itu tercermin dari realisasi bisnis sejumlah perusahaan dan data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga memasuki paruh kedua tahun ini. Namun demikian, para pelaku usaha mengaku optimistis dalam menghadapi bisnis hingga akhir tahun ini.

Berdasarkan statistik keuangan OJK, realisasi piutang perusahaan pembiayaan sampai dengan September 2019 hanya tumbuh 3,53% secara tahunan (*year on year/ yoy*). Pada periode tersebut, total pembiayaan yang disalurkan industri mencapai Rp451,12 triliun.

Sementara itu, pada periode yang sama tahun sebelumnya mencapai Rp435,72 triliun. Angka pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan

dengan pertumbuhan pada kuartal II/2019 yang masih berkisar 4% (*yoy*).

Selain penyaluran bisnis yang tumbuh tipis, industri juga masih harus menghadapi kendala sulitnya mencari pendanaan. Kondisi itu tercermin pada statistik keuangan OJK yang menunjukkan bahwa pendanaan yang diterima oleh industri ini sampai dengan September 2019 hanya tumbuh 0,44% (*yoy*).

Sampai dengan September 2019, jumlah pendanaan yang diterima *multifinance* mencapai Rp283,11 triliun. Angka tersebut naik tipis dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp281,86 triliun.

Faktor pendorong rendahnya pertumbuhan pendanaan *multifinance* yakni karena berkurangnya realisasi pendanaan yang diterima dari dalam negeri (*onshore*), baik dari perbankan, lembaga *non bank*, maupun sumber lainnya.

Realisasi pendanaan *onshore* per September 2019 hanya Rp177,19 triliun, menyusut 1,99% dibandingkan dengan September 2018 senilai Rp180,78 triliun.

Realisasi pendanaan dari lembaga *non bank* bahkan menyusut lebih tajam, yakni sebesar 28,34% menjadi hanya Rp930 miliar, dari sebelumnya menembus Rp1,3 triliun.

Sebagai alternatif, sejumlah pelaku usaha pun melirik pendanaan dari luar negeri (*offshore*), terutama dari lembaga *non bank*. Secara keseluruhan, total pendanaan *offshore* yang diterima *multifinance* sampai dengan September 2019 mencapai Rp105,92 triliun, naik 4,79% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp101,08 triliun.

Khusus dari lembaga *non bank* di luar negeri, jumlah pendanaan yang diterima mencapai Rp14,65 triliun, bertumbuh 17,40% (*yoy*) dibandingkan dengan sebelumnya Rp12,48 triliun.

## Kinerja Multifinance

Jenis Kegiatan Usaha	September 2018	September 2019	Pertumbuhan (%)
1. Pembiayaan Investasi	135.484	137.143	1,22
2. Pembiayaan Modal Kerja	23.872	25.012	4,78
3. Pembiayaan Multiguna	254.619	272.207	6,91
4. Pembiayaan Lainnya Berdasarkan Persetujuan OJK	136	133	-2,16
5. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah	21.614	16.623	-23,09
i. Pembiayaan Jual Beli Berdasarkan Prinsip Syariah	18.160	14.951	-17,67
ii. Pembiayaan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah	37	77	107,36
iii. Pembiayaan Jasa Berdasarkan Prinsip Syariah	3.417	1.594	-53,34
<b>Jumlah</b>	<b>435.724</b>	<b>451.117</b>	<b>3,53</b>

Sumber: OJK.

Kondisi yang terjadi di pasar modal dapat menjadi gambaran. Sebanyak separuh dari 16 *multifinance* yang melantai di bursa efek membukukan rapor merah, baik dari sisi penyaluran pembiayaan, laba, maupun aset. Namun demikian, masih banyak juga emiten *multifinance* yang mencatatkan pertumbuhan positif.

PT BFI Finance Tbk. misalnya. Emiten *multifinance* dengan kode saham BFIN ini mencatatkan laba Rp1,09 triliun per September 2019, turun tipis sekitar 0,27% (*yoy*). Mengacu laporan keuangan perseroan, realisasi piutang pembiayaan per kuartal III/2019 hanya tumbuh 1,02% (*yoy*) menjadi Rp3,68 triliun. Sementara itu, pendapatan perseroan naik 2,98% dari Rp3,72 triliun per September 2018 menjadi Rp3,83 triliun per September 2019.

Sudjono, Direktur Keuangan dan *Corporate Secretary* BFI Finance, menyebutkan bahwa kondisi tersebut justru melegakan bagi perseroan. Hal itu terutama jika mengingat bahwa industri pembiayaan secara umum hanya bertumbuh di kisaran 3% pada kuartal III/2019 atau dibawah target awal sebesar 6%.

“Tren penurunan ini sudah terasa sejak tahun lalu, namun kami berhasil menjaga pendapatan Perusahaan

tetap tumbuh. Salah satunya, kami berhasil menekan biaya kredit (*cost of credit*) menjadi 1,83%,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (25/10/2019).

PT Adira Dinamika Multifinance Tbk. atau Adira Finance juga mengalami kondisi setali tiga uang. Direktur Utama Adira Finance Hafid Hadeli menyebutkan pihaknya merealisasikan pembiayaan baru yang cenderung flat sepanjang Januari-September 2019, yakni sekitar mencapai Rp28 triliun. Hal itu terutama disebabkan adanya penurunan penjualan pada segmen pembiayaan kendaraan roda empat.

Pembiayaan segmen kendaraan roda empat, ujarnya, menurun 6% menjadi Rp11,6 triliun. Namun demikian, dia mengaku bahwa penurunan tersebut dikompensasi dengan peningkatan pada segmen sepeda motor yang tumbuh 6% menjadi Rp14,8 triliun.

Kondisi itu jelas menyebabkan pergeseran kue bisnis di dalam perusahaan. Saat ini, porsi pembiayaan Adira Finance terdiri atas 53% kendaraan roda dua, 42% kendaraan roda empat, dan 5% *durable goods*.

“Peralihan ke motor itu otomatis karena kami *multi product*. Dalam kondisi yang menantang, menyeimbangkan pertumbuhan

dengan kualitas aset menjadi prioritas. Kami sudah 40% bukan kendaraan baru, itu upaya kami,” ujarnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2019.

Direktur Keuangan Adira Finance I Dewa Made Susila menambahkan, dengan kondisi pasar otomotif yang masih lesu, perseroan memutuskan untuk menyesuaikan target pada akhir tahun. “Kalau bisa *flat* saja sudah bagus. Akhir 2018 asosiasi memprediksi pertumbuhan tahun ini sekitar 5%, sampai 9 bulan pertama ternyata angkanya meleset jauh, roda empat turun 12%, penjualan *wholesales* roda dua tumbuh 5%, tapi penjualan ritel dari diler ke konsumen *flat*,” ujarnya.

Tekanan usaha juga dialami oleh *multifinance* afiliasi salah satu bank dengan aset terbesar, PT BCA Finance. Anak usaha PT Bank Central Asia Tbk. itu membukukan pembiayaan senilai Rp24,58 triliun sampai dengan September 2019. Realisasi itu turun 3,9% secara tahunan.

Namun demikian, Direktur Utama BCA Finance Roni Haslim tetap optimistis dapat mencapai target penyaluran pembiayaan yang telah ditetapkan oleh perseroan, yakni Rp32,5 triliun pada akhir 2019. ●

## Penyempurnaan Regulasi

# SDM *Multifinance* Wajib Sertifikasi



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan aturan bagi industri *multifinance* dalam bentuk Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya yakni POJK No. 29/POJK.04/2014.

Terdapat sejumlah pembaharuan materi yang mendapatkan ruang lebih di dalam aturan yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso pada 27 Desember 2018 ini.

Salah satunya yakni terkait dengan sertifikasi dan syarat keberlanjutan usaha bagi perusahaan *multifinance*, yang mendapatkan ruang khusus pada Bab XIII POJK tersebut.

Mengacu pasal 65 ayat 1 aturan tersebut, setiap pegawai perusahaan pembiayaan yang menduduki posisi manajerial mulai dari tingkat kepala kantor cabang sampai dengan satu tingkat di bawah direksi, wajib memiliki sertifikat tingkat dasar di bidang pembiayaan.

Sertifikasi di tingkatan serupa diwajibkan juga terhadap siapapun yang menjabat dewan komisaris. Sementara itu, untuk tingkat direksi wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang pembiayaan.

Khusus bagi direksi dan pejabat satu tingkat di bawah direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko wajib memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko. Selanjutnya, pegawai dan/atau tenaga alih daya yang menangani fungsi penagihan dan eksekusi agunan wajib memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan.

Adapun, sertifikasi tersebut dapat diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK.

Tidak cukup sampai di situ. Anggota direksi dan dewan komisaris yang telah lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan wajib memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit satu kali dalam jangka waktu 1 tahun.

Kewajiban syarat berkelanjutan tersebut mulai dihitung pada tahun takwim berikut ya, setelah individu yang dimaksud disetujui oleh OJK sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris.

Melalui POJK ini, otoritas membuka ruang untuk memenuhi syarat keberlanjutan tersebut. Antara lain dapat dilakukan dengan cara mengikuti seminar, workshop, atau kegiatan lain yang sejenis, serta mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis.



Selain itu, syarat keberlanjutan juga dapat dipenuhi dengan cara menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan, serta menjadi pembicara, pengajar ataupun instruktur dalam kegiatan-kegiatan pendidikan di bidang keuangan.

Sebagai catatan, kegiatan-kegiatan pelatihan tersebut harus diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Antara lain pengawas jasa keuangan di dalam dan luar negeri, asosiasi lembaga jasa keuangan di dalam dan luar negeri, perguruan tinggi di dalam dan luar negeri, atau lembaga pelatihan yang memperoleh izin dari instansi berwenang.

Namun, OJK mengingatkan bahwa sertifikat atau bukti lainnya yang menunjukkan pemenuhan syarat keberlanjutan itu harus disampaikan kepada otoritas paling lambat 1 bulan sejak periode tahunan berakhir.

Eka Noprianto, Branch Manager Jakarta – 2 FIF Group menyebutkan

bahwa pihaknya sudah melakukan penyesuaian terhadap amanat POJK No. 35/POJK.05/2018 dalam hal sertifikasi dan syarat keberlangsungan usaha.

Bahkan, lanjutnya, FIF Group telah menggelar sertifikasi untuk para pegawainya di berbagai level struktural sejak lama. Menurut dia, perseroan malah mendorong para pegawainya untuk meningkatkan kapasitas.

“Untuk kami, saat ini FIF Grup masih mendukung kita untuk sertifikasi, baik itu untuk tenaga lapangan kita maupun level manajerial ke atas,” katanya ditemui di Jakarta, Rabu (20/11).

Sebagai *branch manager* di FIF, Eka telah dua kali mengikuti sertifikasi tingkat dasar. Kedua sertifikasi itu dilakukannya dalam rentang tiga tahun.

“Bedanya POJK 35/2018 dengan POJK yang lama ada dua.

Pertama tentang izin dana tunai, dulu tidak diperbolehkan sekarang diperbolehkan. Kedua, sertifikasi manajerial. Kami (yang ikut sertifikasi) dapat juga materi tentang itu. Lalu (materi) tentang syariahnya juga,” tuturnya.

Kalau kita anggap ini untuk profesi dan tidak melawan hukum harusnya sih enggak jadi beban. Informasi juga bahwa sertifikasi ini berlaku 3 tahun dan bisa diupdate, semacam perpanjangan.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno menyebutkan kehadiran POJK 35/2018 telah memperluas kegiatan usaha *multifinance*. Hal itu terutama untuk pembiayaan modal kerja berupa fasilitas modal kerja atau fasilitas dana.

“Saya harap kita semua sebagai pelaku usaha pembiayaan dapat melihat ini,” ujarnya. ●

# Menjajal Peluang Bisnis Asuransi Digital

Ada pengalaman menarik dari Erwin Siswoyo, 39 tahun. Seorang pebisnis jasa interior itu menceritakan pengalamannya ketika mencari-cari asuransi untuk mobil pribadinya.

Suatu ketika, dia membeli mobil melalui jasa perusahaan pembiayaan. Selama masa cicilan 4 tahun, tentu saja asuransi mobil miliknya masih ditanggung oleh perusahaan leasing. Namun, tahun ini mobil miliknya sudah lunas.

Mau tidak mau, dirinya harus mencari asuransi secara pribadi. Menariknya, dia mendapat jasa asuransi untuk mobilnya secara tidak langsung ke perusahaan asuransi, tetapi lewat pembelian di aplikasi perjalanan *online*.

Meski perusahaan asuransi yang menjadi mitranya hanya terbatas, setidaknya itu lebih memudahkan dirinya. Dia tidak harus mengisi form atau mendatangi kantor perusahaan asuransi tujuan.

Cukup mendaftar melalui aplikasi perjalanan itu, memasukan nama, jenis kendaraan, dan nomor kendaraan, lalu membayar premi yang ditetapkan, lalu muncul pemberitahuan dari penyedia jasa. Semuanya dilakukan secara mudah.

Saat ini, jasa penyedia asuransi secara digital marak. Banyak pemain bisnis baru yang menyasar

pasar itu untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabahnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bisnis asuransi berbasis digital atau yang dikenal dengan istilah *insurance technology (insurtech)* di dalam negeri, memiliki potensi untuk terus tumbuh. Untuk itu OJK selaku lembaga pengawas yang berwenang terus memantau perkembangan model bisnis baru dalam industri asuransi ini.

Juru bicara OJK Sekar Putih Djarot mengatakan potensi tersebut didukung perkembangan teknologi yang sedemikian cepat dan kebutuhan layanan asuransi kepada konsumen, yang diharapkan bisa lebih efektif dan efisien.

Dia menyatakan, potensi transformasi digital di sektor asuransi ini mulai banyak ditanggapi oleh para pelaku industri dalam negeri. Perusahaan asuransi, lanjutnya, mulai membuka wawasan baru terkait inovasi digital, khususnya untuk kanal pendistribusian.

Beberapa di antaranya, mulai memaksimalkan kanal digital yang dimiliki untuk memasarkan produk. Bahkan tidak sedikit perusahaan asuransi yang telah memiliki aplikasi penunjang.

Selain itu, munculnya perusahaan rintisan (*startup*) di bidang teknologi finansial

juga menjadi bukti ekosistem *insurtech* yang sudah mulai terbentuk.

Mereka menawarkan berbagai layanan terkait asuransi, misalnya sebagai agregator atau *marketplace* produk asuransi dan layanan yang memudahkan nasabah untuk melakukan klaim (*claim service handling*).

Sekar menuturkan, kolaborasi antara perusahaan asuransi dengan para *startup* menjadi salah satu pilihan untuk terus tumbuh di tengah persaingan yang makin kompetitif. Pilihan lain bagi perusahaan asuransi adalah mengembangkan ekosistem digital sendiri melalui investasi di bidang teknologi.

“Pada akhirnya, keberadaan *insurtech* ini diharapkan dapat mendorong penetrasi dan densitas asuransi di Indonesia,” katanya.

## Regulasi

Sekar mengatakan bahwa memang belum ada regulasi khusus terkait yang mengatur seluk beluk *insurtech* di dalam negeri.

Kendati begitu, pihaknya telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang berfungsi sebagai payung hukum inovasi digital bidang keuangan secara menyeluruh termasuk *insurtech*.

“Melalui POJK Nomor 13 Tahun 2018 ini, OJK memberikan prinsip-prinsip dasar agar inovasi di sektor jasa keuangan dapat memberikan manfaat yang bertanggung jawab dan mengedepankan perlindungan konsumen,” ujarnya.

Dalam POJK tersebut, juga mengatur tentang penerapan *regulatory sandbox* yang digunakan oleh OJK sebagai sarana untuk pengujian model bisnis inovasi keuangan. Mau bagaimana pun, pelaku *startup* yang terkait dengan jasa keuangan diharuskan memiliki lisensi dari OJK sebagai lembaga yang berwenang, melalui uji coba ini.

Mengutip POJK 13/2018, *regulatory sandbox* dilaksanakan dalam jangka waktu 1 tahun,

dan dapat diperpanjang selama 6 bulan apabila diperlukan. Artinya pelaku *startup* yang mendaftarkan diri untuk mendapatkan lisensi, akan mendapatkan kepastian dari OJK paling lambat satu setengah tahun.

Setelahnya, hasil *regulatory sandbox* terhadap penyelenggara dinyatakan dalam tiga status, yaitu direkomendasikan, perbaikan, atau tidak direkomendasikan.

Sekarang menyebut, saat ini sudah ada beberapa *startup insurtech* yang telah tercatat di OJK dan beberapa lainnya masih dalam proses pengujian di *regulatory sandbox*. Kendati begitu, dia tidak menyebut secara spesifik berapa jumlah perusahaan tersebut.

Selain POJK 13/2018, dia juga mengatakan bahwa POJK Nomor 23 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, sudah membuka peluang bagi perusahaan asuransi untuk melakukan pemasaran produk mereka secara digital.

Adapun, Sekar mengisyaratkan bahwa tidak menutup kemungkinan ke depannya akan dibuat regulasi khusus yang secara spesifik mengatur tentang *insurtech* di Indonesia.

“Masih perlu dikaji karena banyak hal-hal yang perlu dipahami lebih dalam dan juga melihat dari hasil *regulatory sandbox*. Kami terus membuka ruang diskusi dengan para pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya,” tandasnya. ●

**Dalam POJK tersebut, juga mengatur tentang penerapan *regulatory sandbox* yang digunakan oleh OJK sebagai sarana untuk pengujian model bisnis inovasi keuangan. Mau bagaimana pun, pelaku *startup* yang terkait dengan jasa keuangan diharuskan memiliki lisensi dari OJK sebagai lembaga yang berwenang, melalui uji coba ini.**



# Investasi Ilegal yang Kian Berkembang

Tahun 2019 dapat diibaratkan sebagai tahun panen bagi Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi. Total lebih dari 2.000 entitas ilegal yang ditertibkan oleh satuan di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini.

Berdasarkan catatan Majalah OJK, sampai dengan Oktober 2019 saja, Satgas Waspada Investasi telah menutup sekitar 1.773 entitas teknologi finansial (teknologi *peer to peer (P2P) lending* ilegal. Selain itu, pada periode yang sama, Satgas juga telah menutup sebanyak 68 gadai swasta ilegal dan 263 kegiatan usaha tanpa izin.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing mengakui keprihatinannya terhadap maraknya peredaran bisnis entitas ilegal di tengah-tengah masyarakat. Hal itu pula yang mendorong Satgas bersama dengan 13 kementerian/lembaga yang menjadi anggotanya melakukan inisiatif untuk membuka “Warung Waspada Investasi” pada kuartal IV/2019.

Dengan adanya “warung” ini, masyarakat dapat melakukan pengaduan, konsultasi dan

sosialisasi langsung tentang segala persoalan yang terkait dengan investasi, tekfin pinjaman dan gadai swasta ilegal secara langsung kepada regulator.

“Kami jemput bola agar masyarakat bisa langsung bertemu dengan anggota Satgas Waspada Investasi,” kata Tongam saat jumpa pers di Jakarta, pada Kamis (31/10/2019).

Dia mengaku siap menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat, kemudian melakukan tindak lanjut yang berdasarkan pada laporan itu. Masyarakat dapat langsung datang ke Warung Waspada Investasi ini di The Gade Coffee & Gold, Jl H. Agus Salim, Jakarta Pusat, setiap Jumat mulai dari pukul 09.00 – 11.00 WIB.

Selain itu, pihaknya juga tetap membuka saluran layanan komunikasi melalui Kontak OJK 157, email [konsumen@ojk.go.id](mailto:konsumen@ojk.go.id) atau [waspadainvestasi@ojk.go.id](mailto:waspadainvestasi@ojk.go.id).

Dengan kehadiran Warung Waspada Investasi, pihaknya berharap pemahaman masyarakat tentang manfaat dan risiko-risiko di sektor jasa keuangan akan semakin meningkat. Dengan begitu, masyarakat juga akan semakin waspada terhadap maraknya tawaran investasi dan tekfin *lending* ilegal yang kian hari kian marak.

Selama ini, laporan dari masyarakat kerap menjadi landasan bagi Satgas untuk melakukan penyisiran terhadap entitas-entitas ilegal di sektor jasa keuangan. Selain laporan masyarakat, pihaknya juga menerima laporan dari Kementerian





### Statistik Penanganan Satgas Waspada Investasi

No.	Kegiatan	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Entitas Ilegal	80	107	263
2.	Fintech Ilegal	-	404	1.370
3.	Gadai Ilegal	-	-	68

Sumber: OJK per Oktober 2019

Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Penyisiran banyak dilakukan juga pada media sosial.

Menurut Tongam, tekfin ilegal merupakan kasus terbanyak yang ditemukan oleh pihaknya.

Sebagai informasi, sepanjang Januari – Oktober 2019, Satgas Waspada Investasi telah menemukan dan menangani sebanyak 1.369 entitas tekfin *lending* ilegal. Temuan itu meroket lebih dari 300% dibandingkan dengan 2018 sebanyak 404 entitas.

Faktor ilegalitas yang dimaksud adalah melakukan kegiatan bisnis *P2P lending*, tetapi tidak terdaftar di OJK. Selain itu, mereka yang dijarah oleh Satgas juga menjalankan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan kode etik. Di antaranya mematok bunga tinggi dan biaya dengan yang menekan sehingga merugikan masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, Satgas juga kerap menemukan tekfin yang berulang kali membuat platform ilegal, dan muncul dengan nama yang berbeda-beda. Apalagi, di era serba digital seperti saat ini, sangat mudah untuk membuat aplikasi.

Di sisi lain, masyarakat juga banyak yang tergiur dan akhirnya terjerat dengan layanan tekfin ilegal tersebut. Apalagi kalau bukan karena kemudahan fasilitas dalam berutang. Cukup melampirkan foto *copy* KTP dan foto diri, masyarakat bisa langsung memperoleh uang yang diinginkan.

Sayangnya, hal itulah yang pada akhir dimanfaatkan oleh pelaku tekfin ilegal untuk melakukan intimidasi kepada peminjam yang bersangkutan.

“Modusnya bukan dari aplikasi saja, tetapi juga media sosial seperti SMS, *Facebook* dan *Instagram*. Kami

deteksi secara dini. Saat muncul *fintech* ilegal, kami minta langsung blokir ke Kominfo, tidak menunggu (jatuh) korban,” katanya.

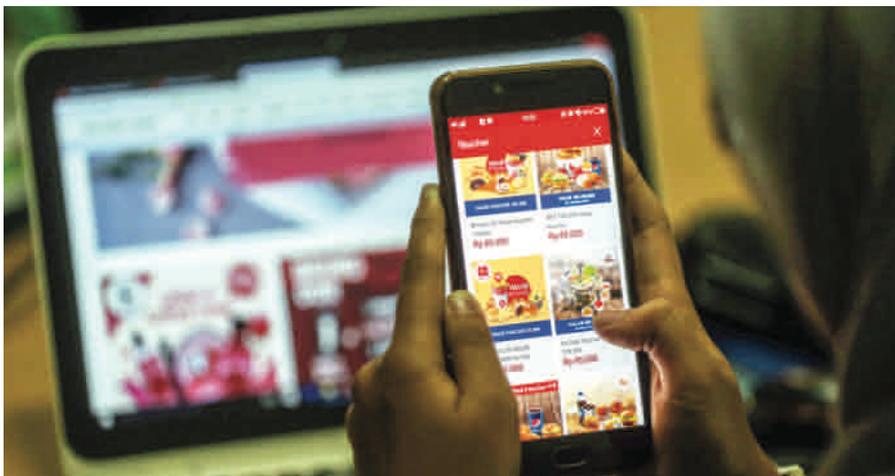
Sementara itu, dari sektor pergadaian, Satgas juga telah menemukan dan menangani sebanyak 68 entitas gadai swasta ilegal sampai dengan Oktober 2019. Melalui pengaduan masyarakat, tidak menutup kemungkinan akan terungkap lebih banyak lagi entitas gadai ilegal.

Di sisi lain, Satgas juga telah menemukan dan menindak 13 kegiatan usaha tak berizin dan berpotensi merugikan masyarakat. Di antara kegiatan usaha yang dilakukan yakni *trading forex* tanpa izin, *multi level marketing*, investasi *cryptocurrency*, koperasi, dan *money game*.

Oleh karena itu, Tongam tidak bosan mengingatkan kepada masyarakat untuk hanya memanfaatkan layanan jasa keuangan yang jelas-jelas terdaftar di OJK.

Anthonius Malau, Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Polri, mengatakan pihaknya ikut melakukan *screening* terhadap *website* yang disinyalir merupakan tekfin ilegal. Temuan itu kemudian disampaikan ke Satgas Waspada Investasi untuk diverifikasi.

“Setelah diverifikasi bahwa itu *fintech* ilegal maka kami akan langsung memblokirnya. Kami harapkan pemblokiran ini bisa membantu melakukan perlindungan konsumen dan masyarakat,” katanya. ●





# Geliat Investasi ETF

Di antara jenis instrumen investasi reksa dana, *Exchange Trade Fund* (ETF) adalah salah satu produk investasi yang masih dalam proses berkembang.

Jumlah produknya pun saat ini baru 36 produk. ETF sejatinya adalah varian reksa dana yang produknya diperdagangkan di bursa efek seperti saham.

Likuiditas yang masih kecil dan belum terbentuknya ekosistem secara sempurna serta literasi yang rendah, membuat produk ETF yang sudah berumur 12 tahun ini lamban berkembang.

Namun, arah perkembangan produk ETF terlihat sudah mulai menggeliat seiring dengan prospek investasi dan relaksasi aturan yang diberlakukan otoritas sehingga memancing sejumlah manajer

investasi mulai ramai menerbitkan ETF.

Pada awal September 2019, Bursa Efek Indonesia telah memberlakukan peniadaan *levy fee* dan penghapusan pajak final untuk produk ETF hingga 2021.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna Setya mengatakan, insentif tersebut diharapkan dapat menstimulus perdagangan ETF di pasar sekunder. Menurutnya, insentif tersebut akan ditinjau ulang secara periodik per enam bulan untuk melihat efektivitasnya dan kebutuhan pemberian insentif lainnya dalam

rangka menstimulus likuiditas produk ETF.

Benar saja, Bursa Efek Indonesia tengah mengkaji untuk mengatur *maximum price movement* dari produk ETF.

Direktur Pengembangan BEI Hasan Fawzi menuturkan, batasan *maximum price movement* yang berlaku saat ini yakni Rp10 untuk naik dan turun dinilai kurang menarik. “Jadi ini kurang menarik karena sekarang saja ada ETF yang harganya sudah cukup tinggi. Ada yang lebih dari Rp20.000, bayangkan kalau dibatasinya Rp10,” jelas Hasan, Jumat, 25 Oktober 2019.

Menurutnya, rencana relaksasi tersebut telah disetujui oleh pemegang saham dan menjadi program dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKAT) 2020. Sejumlah masukan dari pelaku pasar juga sudah masuk. Saat ini, otoritas bursa masih mempertimbangkan antara meningkatkan pergerakan harga maksimum ETF dan angka absolut atau diatur seperti perdagangan saham.

Melalui relaksasi ini, investor diharapkan lebih tertarik mentransaksikan ETF karena pergerakan hariannya sudah tidak terbatas. Pasalnya, praktik yang terjadi saat ini *spread* penawaran dari diler partisipan yang wajib memberikan pesanan di pasar sekunder ETF telah lebih dari Rp10 yakni Rp14-Rp25. “Itulah mengapa *maximum price movement* itu sudah harus disesuaikan dan diperluas,” jelasnya.

Hasan berharap, transaksi perdagangan ETF di pasar sekunder menjadi lebih likuid karena dari sisi penawaran juga sudah mulai tumbuh signifikan.

Dari sisi penawaran, tahun ini sudah tercatat 11 produk ETF yang diterbitkan, sedangkan yang masuk dalam *pipeline* tercatat sebanyak enam produk ETF. Dengan demikian, potensi pencatatan ETF pada tahun ini mencapai 17 produk atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 10 produk.

Dari sisi permintaan, Nyoman Yetna menambahkan, saat ini permintaan produk ETF mulai beragam seiring dengan makin bervariasinya tema-tema yang ditawarkan produk ETF. Misalnya, ETF dengan tema ramah lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) lewat salah satu produk ETF. “Ini akan memberikan pilihan,” ungkapnya.

Untuk menjaga momentum geliat produk ETF ini otoritas bursa membuka peluang untuk memberikan insentif tambahan baik kepada penerbit ETF maupun



diler partisipan. Insentif tersebut bisa berupa insentif untuk biaya pencatatan awal. “Semua lagi kami atur, apa saja yang dibutuhkan supaya produk ini menarik dan berkembang. Kami lakukan sampai ini semua *mature*,” jelas Hasan.

### Tumbuh Pesat

Sejak tiga tahun terakhir, industri ETF tercatat tumbuh pesat di mana saat ini telah ada 16 manajer investasi yang menerbitkan produk ETF atau jauh lebih ramai ketimbang 2017 yang hanya tiga manajer investasi.

Hingga 20 November 2019, jumlah diler partisipan yang menjual produk ETF di pasar primer juga bertambah menjadi enam perusahaan sekuritas dari sebelumnya hanya dua perusahaan pada 2017.

Adapun jumlah produk ETF bertambah dari hanya 10 produk pada 2017 menjadi 36 produk. Dari sisi dana kelolaan, terjadi peningkatan sebesar 136% dari Rp6,4 triliun pada awal 2017 menjadi Rp15,2 triliun per Oktober 2019.

Akan tetapi, perkembangan pesat tersebut baru terbatas pada pasar primer, sedangkan untuk pasar sekunder masih memerlukan berbagai relaksasi dan insentif untuk meningkatkan likuiditasnya.

“Selama ini kan di pasar sekundernya sepi, biasanya langsung ke diler partisipan. Jadi kami ingin kedua pasar ini sama ramainya,” ungkap Direktur Utama Bursa

Efek Indonesia Inarno Djajadi saat memberikan sambutan dalam acara Indonesia ETF Conference di Jakarta pada Rabu, 20 November 2019.

Direktur Indo Premier Investment Manajemen Noviono Darmosusilo menjelaskan, perkembangan pesat industri ETF tersebut salah satunya didorong oleh pengembangan platform ETF yang memudahkan investor baik institusi maupun ritel bisa memantau pergerakan ETF secara transparan dan *realtime*.

Presiden Direktur Indo Premier Sekuritas Moelonoto The menyatakan, saat ini jumlah mitra yang dimiliki mencapai tujuh mitra manajer investasi atau meningkat dari yang awalnya hanya satu manajer investasi yang notabene adalah anak usaha perusahaan.

PT. Indo Premier Sekuritas merupakan diler partisipan terbesar produk ETF di Indonesia. Bahkan Indo Premier merupakan pelopor penerbitan produk ETF di Indonesia pada 2007 dengan produk perdananya bernama Premier ETF LQ45.

Pangsa Pasar Indo Premier pada industri ETF mencapai 96% dengan aset yang dikelola mencapai Rp10,3 triliun.

Selain masalah likuiditas di pasar sekunder, tantangan yang masih harus diselesaikan di industri ETF adalah jenis investor yang saat ini masih didominasi oleh investor institusi. Harapannya, geliat investasi ETF tak hanya terbatas pada pasar primer, tetapi juga likuiditas pasar sekunder dan partisipasi dari investor ritel. ●



## Menjual ORI Sebelum Jatuh Tempo

Pada akhir Oktober 2019, pemerintah telah menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI016. ORI merupakan salah satu instrumen Surat Berharga Negara (SBN) yang ditawarkan pemerintah kepada perseorangan yang tercatat sebagai Warga Negara Indonesia melalui mitra distribusi di pasar perdana.

**N**amun setelah di pasar sekunder, semua jenis investor domestik baik perorangan maupun institusi dapat membeli ORI. Di pasar perdana, ORI bisa dibeli dengan minimum pembelian sebesar Rp1 juta dan maksimum pembelian sebesar Rp3 miliar. Kupon ORI bersifat tetap (*fixed rate*) sampai dengan jatuh tempo.

Setidaknya terdapat 11 keuntungan yang diperoleh investor saat berinvestasi pada ORI. *Pertama*,

kupon dengan tingkat bunga tetap sampai pada waktu jatuh tempo. *Kedua*, kupon dan pokok dijamin oleh UU alias minim risiko gagal bayar. *Ketiga*, pada saat diterbitkan kupon ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.

*Keempat*, kupon dibayar setiap bulan. *Kelima*, tersedianya kuota harga beli (*bid price*) dari mitra distribusi atau pihak lain yang bekerja sama dengan mitra distribusi. *Keenam*, dapat dipinjamkan atau

dijaminakan kepada pihak lain (sesuai dengan kebijakan di masing-masing mitra distribusi) antara lain jaminan dalam pengajuan pinjaman pada bank umum, lembaga keuangan lainnya, atau jaminan dalam rangka transaksi efek.

*Ketujuh*, masyarakat turut berpartisipasi dalam pembangunan nasional karena dana hasil penerbitan ORI digunakan untuk membiayai proyek-proyek strategis dalam APBN. *Kedelapan*, dapat diperdagangkan di *organized OTC* seperti saham melalui

**Pada saat mau menjual ORI, investor dapat menghubungi mitra distribusi tempat membeli ORI pertama kali dan menanyakan harga jual yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya mitra distribusi akan memberikan kuotasi harga ORI016 pada tanggal tersebut. Apabila investor setuju untuk menjual ORI pada harga tersebut, pihak mitra distribusi akan menyampaikan langkah-langkah selanjutnya.**

*Electronic Trading Platform (ETP),* serta transaksi di luar bursa (*over the counter*).

*Kesembilan*, yang pasti investasi pada ORI berpotensi menghasilkan *capital gain* dari pergerakan harganya dengan catatan terjadi kenaikan harga pada saat penjualan dilakukan. Informasi harga yang wajar atau sedang terjadi di pasar sekunder bisa diakses melalui mitra distribusi atau pihak lain yang bekerja sama dengan mitra distribusi.

*Kesepuluh*, pajak yang dikenakan atas kupon ORI adalah Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 15% atau lebih rendah dibandingkan dengan pajak atas deposito yang ditetapkan sebesar 20%.

Dan *kesebelas*, produk ORI sangat likuid karena dapat diperdagangkan di pasar sekunder (antarinvestor domestik) sehingga tak perlu menunggu hingga jatuh tempo. Pasar sekunder adalah pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan instrumen efek yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana (pasar primer).

Pertanyaannya, bagaimana cara menjual ORI sebelum jatuh tempo ketika tiba-tiba investor membutuhkan dana tunai?

Khusus untuk ORI016, investor baru bisa mulai menjual ORI di pasar sekunder setelah masa *holding period* berakhir yakni pada tanggal 15 Desember 2019. Seperti pendahulunya, ORI016 ini memiliki masa *holding period* selama satu kali periode pembayaran kupon

yakni 1 bulan. Dengan demikian, proses pemindahbukuan kepemilikan ORI016 baru bisa dilakukan setelah tanggal 15 Desember 2019.

Pada saat mau menjual ORI, investor dapat menghubungi mitra distribusi tempat membeli ORI pertama kali dan menanyakan harga jual yang berlaku pada saat itu. Selanjutnya mitra distribusi akan memberikan kuotasi harga ORI016 pada tanggal tersebut. Apabila investor setuju untuk menjual ORI pada harga tersebut, pihak mitra distribusi akan menyampaikan langkah-langkah selanjutnya.

Kepala Riset Infovesta Utama Wawan Hendrayana menjelaskan, fleksibilitas jual-beli ORI di pasar sekunder merupakan salah satu keunggulan instrumen ini karena investor bisa mencairkan instrumennya kapan pun tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Dan ketika harganya mengalami kenaikan pada saat penjualan, investor akan memperoleh keuntungan dari selisih harga pada saat pembelian (*capital gain*).

Menurutnya, penjualan kembali ORI dapat dilakukan dengan beberapa cara tergantung jumlah unit yang dimiliki. Untuk kepemilikan ORI dalam jumlah kecil yakni di bawah Rp100 juta, investor bisa menjual ke bank atau mitra distribusi *online*.

Namun, kedua institusi ini biasanya akan membeli ORI dari investor dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Misalnya, jika harga ORI di pasar sebesar 105,

bank atau mitra distribusi *online* akan membeli ORI dengan harga 103.

“Kalau Rp5 juta-Rp10 juta, lebih baik menjualnya lewat agen. Ada program jaminan *buyback* juga,” jelasnya, Senin (30/9/2019).

Wawan melanjutkan, jika nilai ORI yang akan dijual mencapai Rp100 juta hingga Rp1 miliar, investor disarankan untuk menjualnya melalui broker. Pasalnya, harga yang diperoleh bisa mengikuti kondisi pergerakan di pasar. “Tapi ada biaya jasanya (kalau menjual melalui broker),” ujarnya.

Dengan aset yang likuid, Wawan menilai investasi pada ORI merupakan alternatif investasi yang menarik dan menguntungkan. Pasalnya, ORI diterbitkan oleh pemerintah sehingga memiliki risiko rendah dan menawarkan potensi imbal hasil tinggi seiring dengan tren suku bunga acuan Bank Indonesia.

Selain dapat menjual kembali di pasar sekunder, investor ORI bisa menjadikan ORI sebagai jaminan/*collateral* ketika membutuhkan dana tunai mendesak. Menggadaikan ORI ini bisa menjadi alternatif pada saat harga ORI di pasar sekunder sedang turun.

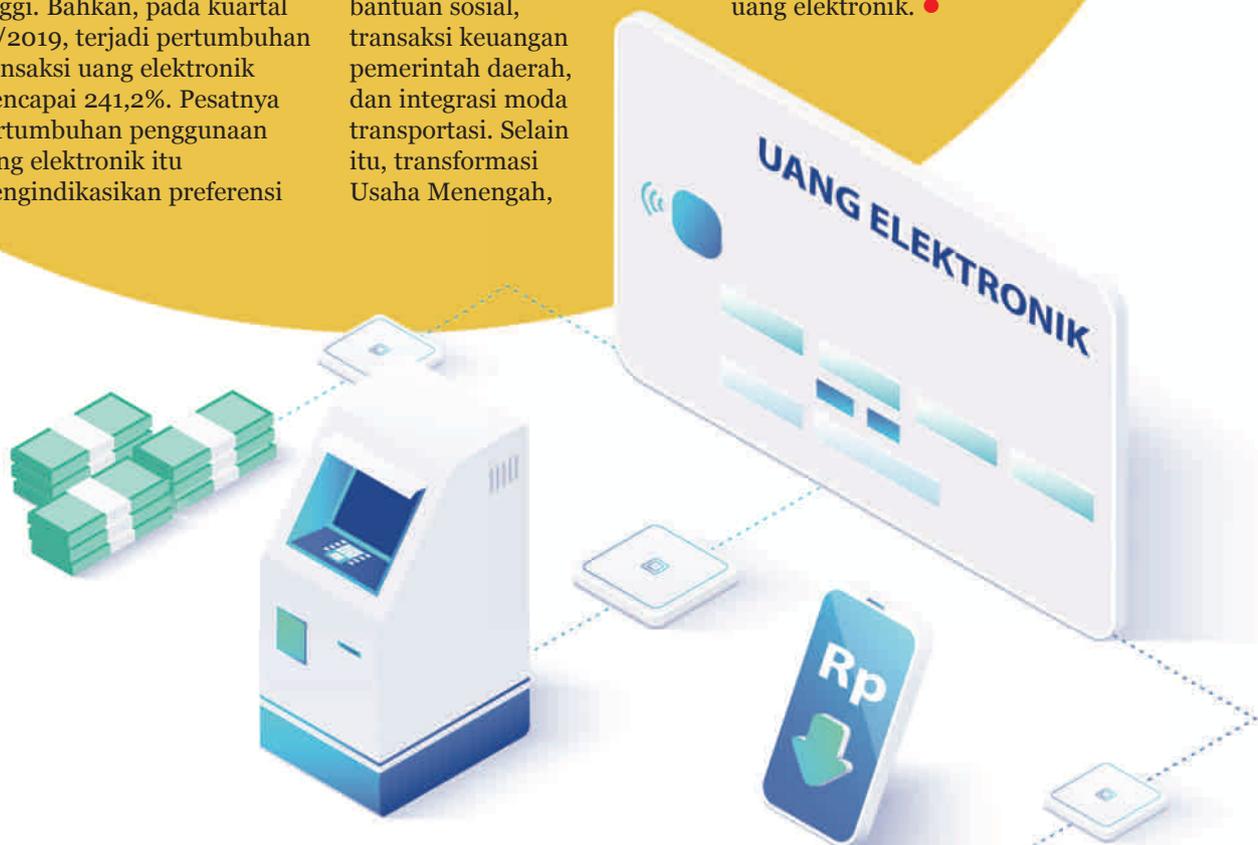
Pemerintah memang tidak mewajibkan mitra distribusi untuk menerima ORI sebagai jaminan. Akan tetapi, saat ini ada mitra distribusi yang dapat menerima ORI sebagai jaminan. Sebaiknya investor menanyakan fasilitas tersebut kepada mitra distribusi yang dipilih karena tidak semua mitra distribusi menerima ORI sebagai jaminan. ●

## Penggunaan Uang Elektronik Terus Meningkat

Terus tumbuhnya penggunaan uang elektronik sebagai alat transaksi membuat jumlah uang elektronik yang beredar semakin tinggi. Bahkan, pada kuartal IV/2019, terjadi pertumbuhan transaksi uang elektronik mencapai 241,2%. Pesatnya pertumbuhan penggunaan uang elektronik itu mengindikasikan preferensi

masyarakat menggunakan uang digital terus meningkat. Penguatan penggunaan uang elektronik dilakukan dengan koordinasi lintas otoritas untuk penyaluran bantuan sosial, transaksi keuangan pemerintah daerah, dan integrasi moda transportasi. Selain itu, transformasi Usaha Menengah,

Kecil, dan Mikro (UMKM) ke arah aplikasi platform digital yang dilakukan pada aspek pembayaran, keuangan dan perdagangan akan memperluas penggunaan uang elektronik. ●



### JUMLAH UANG ELEKTRONIK BEREDAR

**2017** 90,003,848  
**2018** 167,205,578  
**2019\*)** 257,078,749



Januari	173,825,919
Februari	189,222,546
Maret	199,174,153
April	197,413,945
Mei	198,790,786
Juni	209,891,847
Juli	232,348,971
Agustus	250,477,938
September	257,078,749

\*) = September.

Sumber: OJK, Bank Indonesia, diolah.



## Octavianus Budiyanto

Presiden Director PT Kresna Sekuritas

# Harus Ada *Level Playing Field* yang Sama

Di era disrupsi yang masif saat ini, simplifikasi dan *level playing field* yang sama menjadi hal penting agar semua pelaku industri pasar modal bisa tetap menjaga keberlangsungan bisnisnya yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan pasar modal Tanah Air. Berikut wawancara dengan **Presiden Direktur PT Kresna Sekuritas** yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) **Octavianus Budiyanto**

### Bagaimana Anda memulai karir di perusahaan sekuritas?

Saya baru lulus itu awalnya langsung bekerja di bank tahun 1990. Lalu pada 1999 bank itu kena likuidasi. Klien saya waktu itu salah satunya adalah Trimegah Securities. Nah, *owner*-nya menelpon. Saya diminta gabung dan ditawarkan di *investment banking* karena waktu di bank saya pernah di *corporate finance*.

Lalu saya tertarik di saham karena ini dunia baru bagi saya. Saya belajar dari awal proses pembukaan rekening dan transaksi. Kesan saya waktu itu *kok* pasar modal seperti ini, berantakan banget.

Bank saya itu saya anggap sebagai yang tidak layak untuk *survive*, ditutup, artinya kan jelek, tapi jauh lebih bagus sistem perbankan dibandingkan dengan pasar modal saat itu. Satu contoh waktu itu tidak ada spesimen tanda tangan, sedangkan di bank itu hal mutlak. Lalu saya ubah semuanya.

### Apa yang Anda lakukan untuk membenahi itu?

Banyak hal yang saya dapat di perbankan saya masukkan di pasar modal. Salah satunya untuk penarikan dana, saya wajibkan untuk verifikasi. Tanda tangan juga harus diverifikasi.

*At the first time* itu. Waktu itu saya sampai panggil orang Labfor dari Mabes Polri untuk *ngajarin* kita bagaimana verifikasi tanda tangan karena pada waktu itu Trimegah kita

klaim *the king of retail*. Jadi nasabah kita memang banyak dan kalau sudah banyak gini kayak bank enggak bisa, saya harus pakai prosedur bank.

### Ada resistensi enggak?

Awalnya ada resistensi baik dari dalam maupun dari nasabah, tapi saya didukung oleh *owner* jadi harus jalan. Seiring dengan itu, memang peraturan-peraturan di OJK dan bursa *kan* semakin tertib dan bagus.

Jadi buat saya makin menarik ini (pasar modal). Setelah itu saya sempat kerja di bagian *corporate finance* di Trimegah dan kita banyak dapat *project* dari BPPN. Kita banyak jualan aset dan melakukan valuasi.

### Jadi skills Anda apa?

Saya itu dari dulu orangnya generalis, umum. Di bank saya pernah di bagian kas, pernah di bagian *treasury* di *dealing room*, pernah juga pegang kredit *corporate*, saya pegang cabang. Jadi umum. Di *capital market* sama.

Saya sempet di *challenge* oleh dirut saya di kantor yang lama untuk pegang *operation*. Saya mau tapi saya mau konsolidasi semua. Waktu itu aset manajemen masih di bawah sekuritas, satu divisi dan ekuiti.

Saya bilang saya mau

menggabungkan dua ini menjadi satu *operation*. Saya mau bikin satu *create account* yang *single digit account* yang kita kenal sekarang ini SID.

Jadi begitu nasabah buka portofolionya, dia sudah tahu punya sahamnya sekian, punya reksa dananya sekian. Keren banget lah waktu itu.

Tempat lain belum punya. Kalau sekarang *wealth management* sudah banyak tapi waktu itu belum mengenal *wealth management*. Syarat saya disetujui dan jalan jadi satu *single ID*.

Setelah itu tertata semua, saya diminta cari duit. Lalu saya pegang *equity sales*. Akhirnya enam bulan sebelum tahun 2009, saya ketemu pemilik Kresna dan dikasih beberapa *challenge*. *Owner* bilang saya mau kayak Trimegah yang basis retail-nya banyak dengan 27 cabang.



Saya bilang ke beliau, saya bukan spesialisasi yang jago transaksi tapi keahlian saya selama ini yang saya rasa adalah saya bisa *create value* untuk *company* dan itu *takes time*, proses, *enggak* bisa instan bikin perusahaan tiba-tiba jadi besar. Perlu waktu tiga hingga empat tahun karena saya akan *create value* untuk *company* ini.

Akhirnya 2009, saya pindah ke Kresna. Awalnya cabangnya tiga jadi 10 cabang dalam waktu dua tahun. Sekarang kantor cabang Kresna sudah 13 karena kita mau *grab retail* investor.

## Kenapa investor ritel yang disasar?

Karena dari dulu kita percaya *retail* investor ini nanti suatu saat akan menjadi *backbone* dari pasar modal Indonesia karena populasi kita yang begitu besar.

Waktu itu kita dianggap sebagai mimpi karena sebagian besar transaksi itu masih didominasi oleh institusi asing, *ownership* juga begitu, tapi apa yang kita lihat sekarang data menunjukkan bahwa *ownership* itu investor domestik masih kalah sedikit dibandingkan dengan asing, tipis, 51 dan 49.

Kalau transaksi domestik sekarang lebih unggul, domestik 60 sekian, sama hampir 40-an. Akhirnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Itu yang kita harapkan.

Selama ini kita selalu klaim bahwa indeks saham kita itu yang terbaik dalam waktu 10 tahun terakhir. Namun, pertanyaannya siapa yang menikmati?

Bayangkan dari 260 juta orang hanya sekitar 2,2 juta orang yang punya rekening di KSEI, yang *equity* hanya 900.000 orang.

Bukan itu yang menikmati. Berarti yang nikmat orang lain, yaitu institusi asing. Kalaupun kita lihat lagi 900.000 orang yang melakukan transaksi satu bulan sekali itu hanya 180.000. Yang melakukan transaksi satu hari yang tiap hari *trading* hanya 40.000-50.000 orang. Kalau dibandingkan dengan jumlah

## OJK bersama Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) juga sedang bikin *e-bookbuilding*. IPO sekarang memang lagi marak, mungkin tahun ini bisa 70 IPO tapi buat saya angka 70 atau 50 *enggak* penting, yang penting kualitas emitennya baik.

populasi yang 260 juta orang, jadi jauh sekali *gap*-nya.

## Kenapa bisa terjadi *gap* yang besar sekali?

Saya *ngiri* dengan teman-teman perbankan. Kalau kita tanya anak SD dan SMP, tabungan deposito mereka ngerti. Coba kita tanya mahasiswa, 50%-an saja *alhamdulillah* kalau mereka ngerti saham, reksa dana, dan ORI. Literasi masih jadi PR kita bagaimana merubah *mindset* orang Indonesia yang selama ini *saving account* menjadi *investment account*.

## Literasi sudah masif dilakukan sejak beberapa tahun terakhir?

Ya, harus lebih masif karena kita jangan mengambil jarak. Dalam waktu dua tahun terakhir, pertumbuhan investor terbanyak itu berasal dari anak-anak milenial.

Artinya, kami ini sebagai pelaku harus bisa juga menyesuaikan dengan mereka punya *behaviour*, yang katanya *enggak* suka manual, yang katanya maunya semua melalui *apps*, *gadget*.

Ya harus ke sana. Mungkin nanti kita *enggak* perlu datang lagi ke daerah-daerah, karena sudah ada *apps*-nya orang bagaimana *e-learning*, bagaimana mempelajari, sudah lewat itu saja, *enggak* perlu lagi secara fisik datang untuk *cuap-cuap*.

Mungkin bukan zamannya lagi, *cuap-cuap* pun saya bilang saya sudah *enggak* mau pakai batik begini, tapi pakai jins, kaos putih, pakai *snikers*. Jangan sampai mereka bilang *oh* orang kalau pasar modal itu mesti uangnya banyak, takut duluan, *enggak* mau mereka.

Kita *enggak* boleh jaga *gap* itu. Ini sebenarnya hal simpel yang coba

kita pelajari apa sih salahnya yang dulu-dulu?

## Peran regulator seperti apa?

Sekarang regulator sudah menyusun tentang simplifikasi pembukaan rekening. Semua dimudahkan sekarang, melalui *apps* segala macam malah KSEI sudah mulai membuat sistem untuk *e-proxy* dan *e-voting*. Nanti RUPS, nasabah kita kan kasihan di Papua, Aceh *enggak* perlu datang lagi, pakai saja aplikasi itu.

OJK bersama asosiasi (APEI) juga sedang bikin *e-bookbuilding*. IPO sekarang memang lagi marak, mungkin tahun ini bisa 70 IPO tapi buat saya angka 70 atau 50 *enggak* penting, yang penting kualitas emitennya baik.

## Kenapa kualitas emiten menjadi penting?

Kita *kan* lagi genjot-genjotnya investor tapi *at the end of the day* kalau suplainya *enggak* diperbaiki bisa jadi masalah nanti.

Kenapa? Kita bilang IPO yang sekarang ini banyak masalah karena ada yang tiba-tiba naik, lalu tiba-tiba turun. Ini *kan* bikin orang takut. Jadi kapok ini menurut saya *enggak* bagus.

Akhirnya orang akan menghindari untuk saham-saham IPO yang baru-baru. Akhirnya yang dibeli saham-saham *big caps*. Artinya, kalau saham *big caps* saja yang dibeli, harganya naik, PE-nya naik, indeksnya naik, jadi kemahalan.

Kesannya orang kemahalan. Artinya, tidak terdistribusi dengan merata kenaikan indeks tadi. Tapi kalau ada IPO yang besar dan bagus, itu artinya bisa menjadi pilihan investasi. ●

## Nadiem Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

# Pendidikan di Indonesia Belum Maksimal Hasilkan SDM yang Kompeten di Bidangnya

Status sebagai Menteri Milenial, pantas disematkan untuk tokoh yang satu ini. Namanya Nadiem Makarim, yang kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Tidak hanya dari umurnya yang memang relatif mudah, yakni 35 tahun, tapi juga gaya berpakaian pun mencerminkan kebebasan berekspresi, gaya milenial, gaya anak muda.

Sebagai menteri, pria kelahiran 4 Juli 1984 ini sudah menyampaikan sejumlah program sesuai dengan kondisi kekinian untuk kemajuan pendidikan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia dalam berbagai kegiatan, seperti pada rapat kerja pertamanya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 6 November 2019.

Selama periode 2019-2024, Kemendikbud memiliki poin-poin penting yang akan dijalankan. “Saya tidak punya visi sendiri, hanya ada satu visi dan misi, yakni visinya Pak Presiden. Jadi saya hanya mengikuti arahan dan visi beliau,” kata Nadiem dalam rapat di DPR RI pada Rabu, 6 November 2019. Menurutnya, fokus-fokus itu menginterpretasi visi Presiden Joko Widodo terkait dengan pembangunan SDM.



Fokus pembangunan SDM itu dikelompokkan Mendikbud dalam lima fokus. *Pertama*, pendidikan karakter. Kemendikbud akan memprioritaskan pendidikan karakter yang berbasis pengalaman, dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pemuda Indonesia akan memiliki integritas.

“Saat ini kita harus mengerti akar permasalahan, besarnya sosial media teknologi, kalau muda-mudi kita tidak punya karakter dan integritas dan ini akan tergerus tidak benar. Jadi penajahan pemikiran inilah salah satu ancaman penting,” tutur Nadiem.

*Kedua*, deregulasi dan debirokratisasi. Mendikbud ingin memotong semua regulasi yang menghambat terobosan dan peningkatan investasi, terkait

dengan pendidikan di Indonesia. Regulasi dan birokrasi pendidikan yang berbelit di Indonesia, kata Nadiem, menghambat inovasi.

*Ketiga*, persoalan investasi. Mendikbud menginginkan adanya peningkatan investasi dan inovasi kebijakan pemerintah harus kondusif untuk menggerakkan sektor swasta agar dapat meningkatkan investasi, terutama di sektor pendidikan.

*Keempat*, Nadiem menginginkan pendidikan Indonesia dengan kerangka penciptaan lapangan kerja. Semua kegiatan program pendidikan pemerintah, berorientasi pada penciptaan lapangan kerja. “Utamakan pendekatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang baru dan inovatif,” ungkap mantan bos Gojek ini.

*Kelima*, persoalan pemberdayaan teknologi. Mendikbud menginginkan teknologi menjadi penunjang SDM. Dia menginginkan pendidikan berfungsi untuk memperkuat teknologi sebagai alat pemerataan.

Mengenai kurikulum dan tata kelola organisasi yang berlaku dalam sistem pendidikan, tidak bisa disamaratakan di setiap sekolah demi mengakomodasi sepenuhnya keberagaman di Tanah Air. Kurikulum dan tata kelola organisasi yang ada selama ini membuat sekolah dan tenaga pendidik tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Hal itu, diungkapkan Nadiem, yang menyebabkan hasil pendidikan di Indonesia belum maksimal atau belum menghasilkan SDM yang benar-benar kompeten di bidangnya.

“Keberagaman Indonesia itu begitu besar, sehingga yang kita lakukan selama ini dengan standarisasi akan ada dampak buruk. Kita tidak bisa satu standar dan tidak bisa satu cara. Untuk itu, perlu dibuat fleksibilitas kurikulum dan tata kelola organisasi di suatu sekolah,” katanya dalam satu forum diskusi di Hotel Ritz Carlton, Jakarta pada Kamis 28 November 2019.

Fleksibilitas kurikulum dan tata kelola organisasi sekolah yang akan diwujudkan oleh Kemendikbud merupakan representasi dari konsep pendidikan ‘merdeka belajar’. Selain itu, konsep tersebut merupakan bentuk dari transformasi Kemedikbud menjadi pelayan bagi seluruh institusi pendidikan, tenaga pendidik, hingga tenaga kependidikan di Tanah Air.

“Siapa yang merdeka? Semua instansi dalam rantai sistem pendidikan di Indonesia. Sekolah atau perguruan tinggi merdeka dari regulasi dan aturan yang membelenggu. Dosen dan guru merdeka dari aturan kelembagaan dan bisa menentukan arah dan *level* yang cocok bagi anak didiknya. Ini konsep yang berbeda dari sekarang dan *nggak* mungkin tercapai dalam lima tahun, tapi 10-15 tahun,” tuturnya.

Nadiem menyatakan bahwa konsep tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar kurikulum di Indonesia bisa fleksibel mengikuti pesatnya perkembangan zaman. “Yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini adalah gerakan perubahan bukan sekadar kebijakan, kami di Kemdikbud akan memfasilitasi gerakan perubahan itu,” tegasnya. ●

**Mengenai kurikulum dan tata kelola organisasi yang berlaku dalam sistem pendidikan, tidak bisa disamaratakan di setiap sekolah demi mengakomodasi sepenuhnya keberagaman di Tanah Air. Kurikulum dan tata kelola organisasi yang ada selama ini membuat sekolah dan tenaga pendidik tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.**

# Lebih Terjaga dengan *Fintech Data Center*

**A**sa untuk memiliki pusat data teknologi finansial atau *Fintech Data Center (FDC)* yang *real time* sebentar lagi menjadi nyata.

Saat ini, asosiasi di segmen *financial technology (fintech) peer to peer (P2P) lending* sedang berbenah dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merealisasikan terlaksananya proses informasi *FDC* yang *real time* pada kuartal I/2020.

Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non Bank OJK Riswinandi berharap kehadiran *FDC* dapat mencegah terjadinya pinjaman berganda di sektor *fintech*. Dengan demikian, hal itu akan mengikis potensi fraud di sektor ini.

“Semoga informasi (*FDC*) dapat mencegah *double financing* atau *multiple financing*. OJK sangat mendukung pembangunan *FDC* ini. *FDC* memberikan gambaran kepada kami bahwa *fintech* punya ruang untuk menyalurkan kebutuhan pendanaan,” tuturnya, Senin, 11 November 2019.

Apalagi, angka temuan fraud di *fintech lending* tergolong tinggi. Bahkan pada tahun ini pernah ada temuan salah satu peminjam (*borrower*) *fintech lending* yang diketahui meminjam ke 143 *fintech*. Hal itu tentu saja membawa kerugian bagi pemberi pinjaman (*lender*).

Menurut Ketua Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Adrian Gunadi, sampai dengan Senin, 11 November 2019 telah ada 15 perusahaan penyelenggara *fintech lending* yang ikut serta dalam uji coba *FDC*.

Pada akhir November 2019, AFPI memastikan seluruh penyelenggara *fintech lending* terdaftar yang berjumlah 144 perusahaan turut melaporkan data peminjamnya kepada *FDC*.

Dengan mekanisme tersebut, setiap *P2P lending* terdaftar

menyampaikan data peminjamnya kepada dua mesin yakni *FDC* milik AFPI dan pusat *data fintech lending* (Pusdafil) milik OJK.

Secara keseluruhan, terdapat tujuh jenis data yang dapat dibagikan dalam sistem tersebut. Di antara jenis data tersebut yakni Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan kolektibilitas kredit.

AFPI akan memeriksakan terlebih dahulu setiap data yang diterimanya kepada Pusdafil. Hal itu untuk memastikan kebenaran setiap data yang masuk. Setiap penyelenggara juga wajib mengecek data *FDC* sebelum menerima aplikasi pinjaman.

Di sektor keuangan *non bank*, pengelolaan pusat data serupa telah dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). Asosiasi di sektor *multifinance* itu membentuk sebuah badan usaha baru yang bertanggung jawab untuk mengelola setiap informasi nomor rangka dan mesin kendaraan yang dibiayai oleh perusahaan *multifinance*.

Adrian menjelaskan bahwa *FDC* dikelola oleh AFPI untuk memudahkan para anggotanya dalam melakukan *credit assessment*. Dengan demikian, setiap penyelenggara *fintech* yang hendak menyalurkan pinjaman dapat terhindar dari pinjaman berlebihan, kredit yang buruk, serta potensi terjadinya *fraud*.

“Ini bagian dari tugas asosiasi untuk *market conduct*. Sudah ada semacam surat edaran dari OJK untuk semua *platform* wajib memberikan atau membagi data (peminjam) ke asosiasi,” ujar Adrian.

Dalam perkembangannya, *FDC* juga dapat digabungkan ke data milik perbankan dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik

OJK. Selain dengan SLIK, lanjutnya, *FDC* juga akan diintegrasikan dengan data di sektor jasa keuangan lainnya, seperti data asuransi, *multifinance*, pasar modal, serta data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Dengan akses yang lebih terbuka ini, AFPI berusaha sebisa mungkin untuk menjaga agar data-data di *FDC* tidak diselewengkan. Oleh karena itu, ada dua syarat utama yang ditetapkan kepada *fintech* untuk mengakses data *FDC*.

*Pertama*, data yang diakses berasal dari calon *borrower* yang memang sedang mengajukan proses pinjaman. *Kedua*, pemanfaatan data *FDC* wajib digunakan hanya untuk mengecek kualitas pinjaman sang calon *borrower* di tempat lain, apakah bermasalah atau tidak. Hal itu sebagai upaya bagi perusahaan untuk mengelola risiko.

Namun, jika ternyata pemanfaatan *FDC* dilakukan tanpa memenuhi kedua syarat itu, asosiasi tidak segan-segan memberikan sanksi terhadap perusahaan tersebut, termasuk mencabut keanggotaan.

Menurut Hendrikus Passagi, Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, kehadiran *FDC* akan menjaga kualitas pinjaman pada *fintech lending*. Namun, pihaknya tetap berharap *fintech lending* tidak mencatatkan rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)* di level 0%.

Pasalnya, dengan *NPL* yang kosong, mesin kecerdasan buatan perusahaan tidak mampu mengenali karakter calon peminjam. “Ketika *fintech P2P lending NPL*-nya nol, berarti gagal upaya kami mendorong *fintech* untuk meningkatkan inklusi keuangan terhadap orang-orang yang (tidak terakses) oleh industri jasa keuangan konvensional,” ujarnya. ●



## Aneka Akad Dalam Pembiayaan Syariah

Perbankan memiliki skema pembiayaan berbeda dibandingkan dengan bank konvensional. Perbedaan utama ada pada akad atau kontrak. Akad tersebut berbeda antara pembiayaan maupun simpanan masyarakat.

Dalam hal pembiayaan jual beli dilakukan dengan menggunakan beberapa akad. *Pertama*, akad Murabahah, yakni transaksi jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan kemudian pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai margin yang telah disepakati.

*Kedua*, akad Salam yang merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan cara melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan kriteria tertentu dan untuk pembayarannya dilakukan di awal secara penuh.

*Ketiga*, akad Istishna' adalah transaksi jual beli suatu barang dengan pemesanan terlebih dahulu dengan kriteria tertentu dan untuk pembayarannya disesuaikan dengan kesepakatan para pihak.

Kemudian untuk pembiayaan investasi atau jangka panjang, *pertama* akad Mudharabah. Dalam hal ini hampir mirip dengan jual beli, tapi Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua pihak dalam suatu usaha. Pihak pertama (*shahib mal*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan untuk keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan para pihak.

*Kedua*, akad pembiayaan investasi Musyarakah, yakni kerja sama antara

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

*Ketiga*, Mudharabah Musytarakah, yakni akad kerja sama antara dua pihak dalam suatu usaha, dimana kedua pihak tersebut turut menyertakan modal dan untuk keuntungan serta risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan para pihak.

*Keempat*, akad Musyarakah Mutanaqisah, yakni musyarakah atau syirkah, dimana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang karena pembelian porsi kepemilikan secara bertahap oleh pihak lainnya.

Selanjutnya pembiayaan jasa atau *leasing* dengan menggunakan, *pertama*, Ijarah, yakni transaksi pemindahan manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu disertai pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan akan barang tersebut.

*Kedua*, Ijarah Muntahiyah Bittamlik merupakan transaksi ijarah yang disertai dengan janji pemindahan kepemilikan (*wa'd*) setelah masa ijarah selesai. *Ketiga*, Hawalah, yakni transaksi pengalihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayaran utangnya. Hawalah bil Ujrah, hawalah dengan pengenaan imbal jasa (*ujrah*).

*Keempat*, Wakalah atau Wakalah bil Ujrah, yakni pemberian kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua

dalam hal-hal yang boleh diwakilkan apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi.

*Kelima*, Kafalah atau Kafalah bil Ujrah, yakni transaksi jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfiul anhu*).

Adapun Kafalah bil Ujrah merupakan transaksi Kafalah dengan pengenaan imbal jasa (Ujrah). Penggunaan akad Kafalah atau Kafalah bil Ujrah harus dibarengkan dengan penggunaan akad yang lain (tidak dapat berdiri sendiri). *Keenam*, Ju'alah, yakni janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Penggunaan akad Ju'alah harus dibarengkan dengan penggunaan akad yang lain (tidak dapat berdiri sendiri).

*Ketujuh*, Qardh, yakni transaksi pinjam meminjam dana (dana talangan) tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan akad Qardh harus dibarengkan dengan penggunaan akad yang lain (tidak dapat berdiri sendiri).

Kegiatan Pembiayaan Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad selain yang telah disebut di atas dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ●

## Hubungan Antara Obligasi dan Peringkat Utang Perusahaan

Salah satu instrumen investasi di pasar modal adalah surat utang alias obligasi. Selain diterbitkan oleh pemerintah, obligasi juga diterbitkan oleh perusahaan dalam rangka menghimpun dana masyarakat untuk keperluan pembiayaan ekspansi bisnis.

Lalu apa hubungan antara obligasi dan peringkat utang perusahaan?

Hubungan antara obligasi dan peringkat utang (*rating*) saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Pasalnya, peringkat utang merupakan salah satu alat untuk memitigasi risiko dari investasi di produk obligasi.

Peringkat utang adalah penilaian risiko kredit dari penerbit obligasi yang didasarkan pada riwayat finansial, aset, dan kewajiban. Tiga risiko utama yang masuk dalam penilaian adalah risiko industri, risiko bisnis, dan risiko keuangan. Selain itu, faktor dukungan induk perusahaan juga menjadi bagian dari penilaian.

Hasil penilaian peringkat utang tersebut akan menggambarkan tingkat kemampuan penerbit obligasi dalam melaksanakan kewajiban pembayaran bunga dan pokok obligasi.

Selain itu, peringkat utang juga menjadi acuan dalam penentuan besaran kupon atau imbal hasil obligasi yang akan diberikan oleh perusahaan penerbit obligasi kepada investor. Peringkat utang yang rendah mengindikasikan risiko yang tinggi atas kemungkinan gagal bayar sehingga makin rendah peringkat utang perusahaan, makin besar pula bunga pinjaman yang ditawarkan kepada investor. Begitu sebaliknya.

Status peringkat akan di-*review* secara berkala oleh lembaga

pemeringkatan efek sehingga investor dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengukur risiko investasi, tingkat kredibilitas perusahaan, dan prospek atas kinerja perusahaan. Pada saat peringkat utang mengalami penurunan, hal tersebut mengindikasikan tingkat risiko perusahaan penerbit obligasi dalam memenuhi kewajibannya menjadi lebih rendah yang pada akhirnya dapat berpotensi mengalami gagal bayar.

Di Indonesia, ada lima lembaga pemeringkatan dan peringkat efek yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kelima lembaga tersebut adalah Fitch Ratings, Moody's Investor Service, Standard and Poor's, PT Fitch Ratings Indonesia, dan PT Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo).

Dari sisi jenjang peringkat, level peringkat dibagi menjadi dua yakni peringkat investasi (*investment grade*) dan peringkat spekulatif atau sampah (*non-investment grade*). Skala peringkat yang masuk kategori *investment grade* adalah BBB- ke atas, sedangkan skala peringkat yang masuk kategori *non-investment grade* adalah di bawah BBB-.

Adapun skala peringkat menurut masing-masing lembaga pemeringkatan efek adalah *pertama*, Fitch Ratings memberikan simbol AAA untuk peringkat tertinggi dan D untuk peringkat terendah. *Kedua*, Moody's Investor Service memberikan simbol Aaa untuk peringkat tertinggi dan simbol C untuk peringkat terendah.

*Ketiga*, Standard and Poor's memberikan simbol AAA untuk peringkat tertinggi dan simbol D untuk peringkat terendah. *Keempat*, PT Fitch Ratings Indonesia memberikan simbol AAA(idn) untuk peringkat tertinggi dan simbol D(idn) untuk peringkat terendah. *Kelima*,

Pefindo memberikan simbol idAAA untuk peringkat tertinggi dan simbol idD untuk peringkat terendah.

Adapun penambahan tanda (+) pada simbol peringkat dilakukan untuk menunjukkan bahwa skala peringkat yang diberikan relatif kuat sehingga memiliki kecenderungan untuk ditingkatkan status peringkatnya. Sementara itu, untuk tanda (-) menunjukkan skala peringkat yang diberikan relatif lemah sehingga ada potensi statusnya diturunkan.

Simbol peringkat tersebut berpotensi mengalami perubahan sesuai dengan hasil *review* berkala yang dilakukan oleh lembaga pemeringkatan.

Selain skala peringkat, lembaga pemeringkatan juga memberikan penilaian berdasarkan prospek atau *outlook* yang juga menjadi dasar keputusan apakah simbol peringkat yang telah diberikan bakal direvisi ke atas, ke bawah, atau tetap.

Penilaian prospek peringkat tersebut umumnya berupa prospek positif, prospek negatif, dan prospek stabil.

Bagi investor yang berinvestasi pada instrumen obligasi, sudah tentu *updating* peringkat utang dari perusahaan penerbit obligasi harus dipantau dalam rangka memitigasi risiko. ●

## Survei OJK

# Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan 2019 Meningkat

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa target indeks literasi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen sebesar 35%, serta target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% telah tercapai.

Survei nasional yang dilakukan OJK tahun 2019 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan hasil survei OJK 2016, yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%.

Jadi, dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39%.

Menurut Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, peningkatan itu merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah, OJK, kementerian/ lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lain, yang terus berusaha secara berkesinambungan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.

“Dengan sinergi dan kerja keras tersebut target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebesar 75% pada tahun 2019 telah



tercapai,” ujarnya dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan media massa di Surabaya, Kamis, 7 November 2019.

Survei OJK 2019 ini mencakup 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan *gender* dan strata wilayah perkotaan/perdesaan.

Sebagaimana tahun 2016, SNLIK 2019 juga menggunakan metode,

parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*).

Berdasarkan strata wilayah, untuk perkotaan indeks literasi keuangan mencapai 41,41% dan inklusi keuangan masyarakat

perkotaan sebesar 83,60%, sementara indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat perdesaan adalah 34,53% dan 68,49%.

Hasil survei juga menunjukkan bahwa berdasarkan gender indeks literasi dan inklusi keuangan laki-laki sebesar 39,94% dan 77,24%, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan sebesar 36,13% dan 75,15%.

### Literasi Keuangan Syariah

Indeks literasi (pemahaman) dan inklusi (penggunaan) keuangan masyarakat tentang produk dan jasa keuangan syariah masih rendah. Hal ini terlihat dari indeks literasi keuangan syariah baru mencapai sebesar 8,1% pada tahun 2016 dan 8,93% pada tahun 2019, Untuk indeks inklusi keuangan syariah sebesar 11,1% pada tahun 2016 dan 9,10% pada tahun 2019.

Indeks inklusi keuangan syariah sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan indeks literasi. Ini menunjukkan bahwa sebagian orang sudah menggunakan produk keuangan syariah, tapi belum memahami keuangan syariah sepenuhnya.

Berdasarkan tingkat pendidikan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi juga tingkat literasi dan inklusi keuangan pada kedua survei.

### Sektor Jasa Keuangan

Diketahui bahwa berdasarkan sektor jasa keuangan pada tahun 2016 indeks literasi keuangan pada sektor perbankan sebesar 28,9% dan pada tahun 2019 sebesar 36,12% masih dominan jika dibandingkan sektor lain, seperti asuransi, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan, pergadaian dan lembaga keuangan mikro.

Selain itu, pada tahun 2016 indeks literasi keuangan untuk pasar modal hanya sebesar 4,4% dan pada tahun 2019 sebesar 4,92%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum

sepenuhnya sadar akan pentingnya produk dimaksud.

Indeks inklusi keuangan berdasarkan sektor jasa keuangan juga didominasi sektor perbankan sebesar 63,6% pada tahun 2016 dan 73,88% pada tahun 2019. Pada sektor lain, seperti asuransi, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan, pergadaian dan lembaga keuangan mikro masih cukup rendah. Indeks inklusi keuangan untuk sektor pasar

**“Dengan sinergi dan kerja keras tersebut target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif sebesar 75% pada tahun 2019 telah tercapai.”**

modal hanya 1,3% pada tahun 2016 dan 1,55% pada tahun 2019.

Kondisi dimaksud perlu dicarikan solusi agar sektor pasar modal dapat lebih dikenal oleh masyarakat, sehingga mereka dapat menginvestasikan uangnya di pasar modal untuk kesejahteraan jangka panjang.

Selain itu, gap antara indeks literasi dan inklusi keuangan pada sektor perbankan sebesar 37,76%, pada sektor dana pensiun sebesar 7,95%, sektor asuransi sebesar

6,25%, sektor pergadaian sebesar 5,43%, sedangkan sektor pasar modal, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan mikro tidak terlalu signifikan. Ini menunjukkan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat terhadap sektor pasar modal dan lembaga keuangan mikro masih sangat rendah dibandingkan dengan sektor lainnya.

Hal tersebut perlu ditingkatkan dengan program literasi dan inklusi keuangan bekerja sama dan bersinergi dengan Industri Jasa Keuangan, pemerintah, OJK setempat, kementerian/lembaga terkait, dan berbagai pihak lain, untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

### Strategi Pengembangan Literasi

Literasi keuangan sejak dini sangat diperlukan guna lebih memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk memiliki kehidupan yang aman dan terencana dalam hal keuangan.

Implementasi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) yang telah dilakukan selama tahun (2013-2018), dirasa perlu untuk dilakukan evaluasi dan upaya perbaikan terhadap program literasi keuangan agar kegiatan ke depannya menjadi lebih baik dan efektif dibandingkan dengan saat ini.

OJK akan menggunakan hasil survei literasi keuangan 2019 ini untuk penyempurnaan strategi pengembangan literasi keuangan nasional yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Program Literasi dan Inklusi Keuangan ke depan dapat dilakukan dengan media sosial, iklan layanan masyarakat, dan berbagai sosialisasi agar literasi dan inklusi keuangan dapat diterima masyarakat perkotaan sampai dengan perdesaan. Berdasarkan hasil survei tahun ini, masyarakat di perdesaan belum memperoleh literasi dan inklusi keuangan dimaksud sebaik yang di perkotaan. ●

# Fintech Menjamur Beri Andil Capai Target Inklusi Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyelesaikan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga pada 2019. Survei tersebut dilakukan dari hasil pengumpulan pendapat 12.773 responden.

Dari responden sebanyak itu, tercatat sekitar 4.536 orang atau 35,51% responden mengetahui layanan keuangan internet (*online/digital*). Layanan keuangan digital atau *branchless banking* adalah kegiatan layanan jasa pembayaran dan keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital, seperti seluler atau *web* melalui pihak ketiga.

Dari responden dimaksud, terdapat 31,26% responden yang

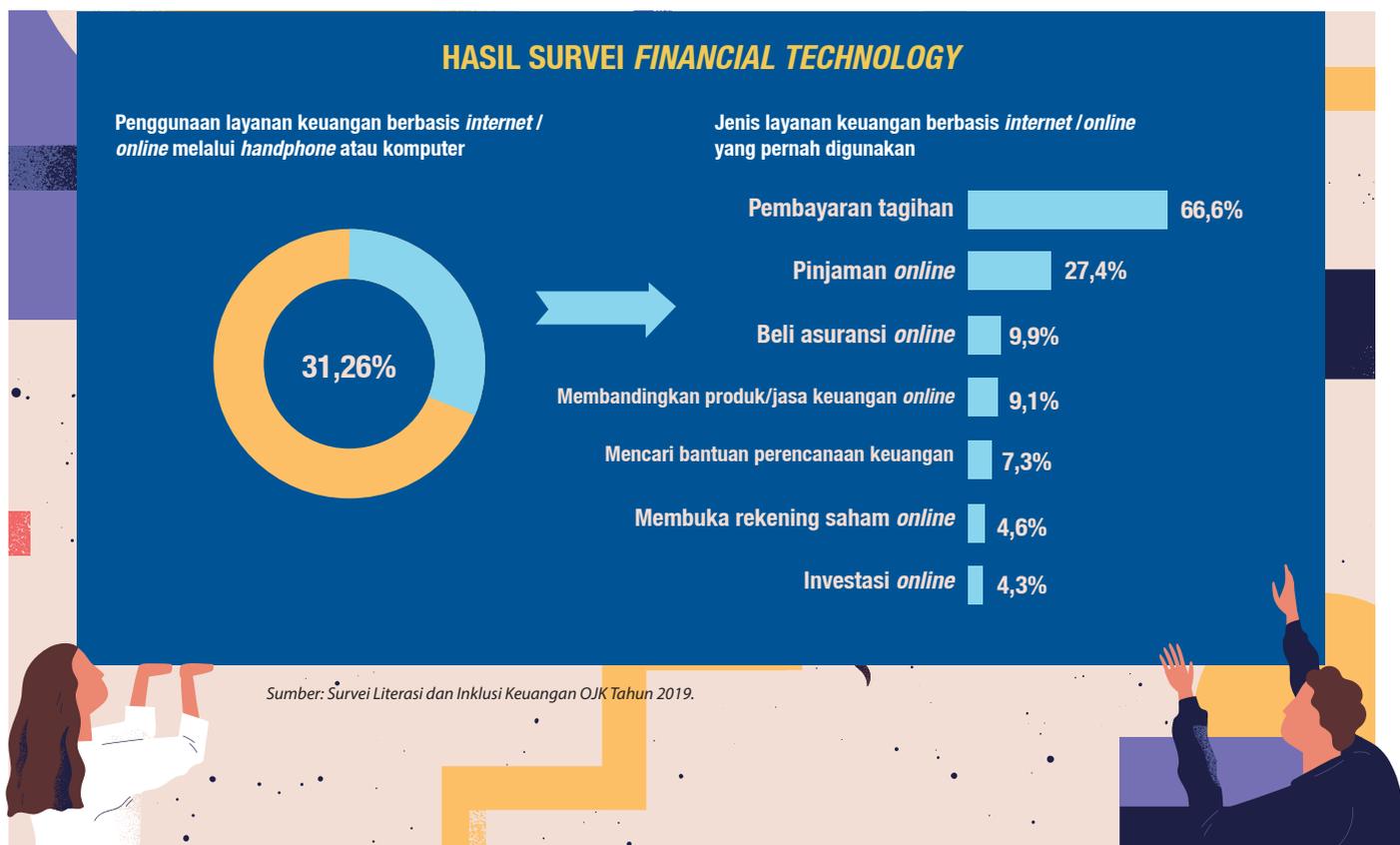
menggunakan layanan keuangan berbasis internet/*online* melalui *handphone* atau komputer. Jenis layanan keuangan dimaksud yang pernah digunakan adalah mayoritas untuk pembayaran tagihan sebesar 66,6% dan pinjaman *online* sebesar 27,4%.

Sisanya adalah untuk membeli asuransi *online*, membandingkan produk atau jasa keuangan *online* (*aggregator*), mencari bantuan perencanaan keuangan, membuka rekening saham *online*, dan investasi *online*.

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa menjamurnya perusahaan *financial technology* (*fintech*) ternyata memiliki andil

terhadap pencapaian target inklusi keuangan. *Fintech* berkolaborasi dengan sektor jasa keuangan menghadirkan produk-produk keuangan yang lebih mudah diakses masyarakat.

Pada akhirnya, OJK pada 2019 berhasil mencapai target indeks literasi keuangan yang sesuai dengan apa yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 50 tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen sebesar 35% serta target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75%. ●





## FinExpo 2019

# Wadah untuk Kenalkan Ragam Produk Keuangan

**G**una meningkatkan inklusi keuangan nasional pada tahun ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan FinExpo 2019 bertema “Sinergi Aksi Indonesia Menabung: Gapai Puncak Inklusi, Perlindungan Makin Pasti” pada 19 Oktober 2019.

Perhelatan yang melibatkan 90 Lembaga Jasa Keuangan (LJK) ini dilaksanakan di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. LJK yang berpartisipasi itu berasal dari institusi perbankan, *multifinance*, asuransi, dana pensiun, dan *financial technology*.

Peluncuran FinExpo tahun ini secara resmi dibuka oleh Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Nurhaida, Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Tirta Segara, Kepala

Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank Riswinandi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Hoesen, Ketua Dewan Audit dan Anggota Dewan Komisiner OJK Ahmad Hidayat, Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan Didik Madiyono, Kepala Departemen Komunikasi Onny Widjanarko, dan Ketua FinExpo & *Sundown Run 2019* Wani Sabu.

Sebenarnya, kegiatan ini merupakan puncak dari acara Bulan Inklusi Keuangan dan salah satu implementasi dari diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung yang diperingati setiap 20 Agustus.

Acara ini berlangsung selama empat hari, mulai dari 17-20 Oktober dan LJK menampilkan

bermacam *booth* sebagai wadah untuk menjelaskan ragam produk keuangan, inovasi digital yang telah mereka lakukan, dan menjaring nasabah baru.

Pada kesempatan itu, OJK memberikan penghargaan kepada sejumlah LJK yang telah berhasil melaksanakan program Simpanan Pelajar (SimPel) dan Perlindungan Konsumen, *Journalist Writing Competition*, *Fin Idol Cilik*, *Vlog Competition*, dan Lomba Pariwisata yang diikuti oleh LJK dan masyarakat umum. Acara juga diisi dengan *talkshow* terkait perencanaan keuangan, investasi dan produk keuangan, serta *edutainment*.

Menurut Nurhaida, program “Sinergi Aksi Indonesia Menabung” bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menabung untuk masa depan. Peningkatan minat masyarakat untuk menabung diharapkan dapat menambah jumlah pemilik rekening baru.

Adapun, menabung tersebut tidak hanya *saving* sejumlah uang di bank, tetapi dapat dilakukan dengan berinvestasi, saham, asuransi, dan dalam bentuk lainnya. Penyelenggaraan acara ini

merupakan kontribusi LJK untuk mendekatkan diri terhadap layanan keuangan.

“Kita memiliki peran yang sama penting untuk meningkatkan perluasan akses keuangan dan penguatan perlindungan konsumen. Peningkatan ini sangat strategis karena sejalan dengan target yang disampaikan pemerintah untuk menurunkan tingkat kemiskinan atau ketimpangan sosial,” tutur Nurhaida.

Perluasan akses keuangan, khususnya akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau diharapkan dapat menjawab masalah permodalan pembiayaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Indonesia memiliki jumlah UMKM yang sangat banyak dan belum memiliki akses keuangan formal.

Di sisi lain, perlindungan konsumen ialah aspek penting yang mesti dikedepankan. Jika hal ini tidak diperhatikan, maka konsumen tidak akan berminat untuk menerima pembiayaan dari jasa keuangan.

“Kebijakan perlindungan konsumen tentu akan penting. Kalau tidak kita lindungi mereka akan menggunakan jasa keuangan sekali, dua kali, lalu mereka kapok. Karena itu kita akan edukasi agar mereka paham bentuk perlindungan konsumen yang ada,” ungkap Nurhaida.

Selain itu, Nurhaida berharap OJK bersama LJK bersinergi meningkatkan taraf hidup masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar, tapi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

Hal senada juga disampaikan Wani. Menurut dia, pengetahuan

mengenai perlindungan konsumen perlu diinformasikan kepada masyarakat luas agar tidak salah dalam menilai LJK.

“Kami sengaja menggelar kegiatan ini dengan berfokus pada pentingnya perlindungan konsumen sebagai salah satu wujud nyata langkah OJK dan BI dalam menggandeng PUJK untuk meningkatkan inklusi keuangan,” tuturnya.

Wani menjelaskan bahwa meningkatkan inklusi keuangan dengan memantapkan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan jasa keuangan, serta membuka akses keuangan untuk sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, pembiayaan, pergadaian, dana pensiun dan *fintech*.

Berdasarkan hasil survei OJK, inklusi keuangan pada tahun 2019 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 75%. Sementara target literasi keuangan sebesar 35% terhitung hingga akhir tahun ini, juga sudah terlampaui.

Di tempat yang berbeda, OJK mengadakan *Sundown Run* yang diikuti 3.000 peserta dari berbagai elemen untuk berlari sejauh 5 kilometer menyusuri kawasan Epicentrum hingga Kota Kasablanka. *Sundown Run* dapat menjadi alat dan media yang paling efektif untuk menyosialisasikan inklusi keuangan.

FinExpo 2019 sengaja dilakukan di tempat terbuka seperti di pusat perbelanjaan agar dapat disaksikan langsung oleh masyarakat yang mengunjungi tempat perbelanjaan tersebut. Hasil dari penyelenggaraan FinExpo dan Sundown Run 2019 adalah pembukaan rekening baru sebanyak 23.849 dengan total transaksi mencapai Rp100 miliar dan dihadiri oleh lebih dari 200.000 pengunjung selama empat hari penyelenggaraan tersebut. Sejak 2016, OJK dan LJK telah menginisiasi bulan Oktober sebagai bulan inklusi keuangan untuk mendorong akselerasi tingkat inklusi nasional. ●



# OJK Banyak Terima Pengaduan Soal *Debt Collector Leasing*



Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling banyak menerima pengaduan dari konsumen untuk sektor pembiayaan. Sektor tersebut bahkan mengalahkan jumlah pengaduan dari sektor perbankan.

Menurut laporan triwulan II/2019 OJK, layanan konsumen OJK menerima 28.434 layanan yang terdiri dari 6.366 layanan penerimaan informasi (laporan), 21.938 layanan pemberian informasi (pertanyaan) dan 130 layanan pengaduan. Dari 21.938 pertanyaan, terdapat 132 layanan yang diindikasikan sebagai pengaduan.

Secara umum, penagihan dari *debt collect* mendominasi keluhan nasabah di industri jasa keuangan. Menyusul permintaan informasi debitur, kesulitan klaim

asuransi, restrukturisasi kredit atau pembiayaan dan legalitas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan produk.

Meski demikian, pengaduan lebih banyak berasal dari lembaga pembiayaan, yaitu 41,54% dari total pengaduan. Selanjutnya pengaduan perbankan 33,85%, perasuransian 18,46%, dana pensiun 3,85% dan non-LJK 1,54%.

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Sarjito membenarkan bahwa lembaga pembiayaan banyak dikeluhkan konsumen, seperti penagihan dari pihak ketiga yang dikontrak *multifinance*.

Biasanya, *multifinance* mengerahkan *debt collector* atau mata elang untuk menagih kredit. "Lebih ke penagihan, misalnya nasabah *multifinance* dicegat di

jalan. Namanya juga mata elang, mereka ada di mana-mana untuk menagih," kata Sarjito di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selain penagihan, konsumen juga mengeluhkan soal tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), padahal kredit sudah lunas. Meski demikian, terkadang konsumen juga bermain nakal.

Misalnya, adanya kelompok penadah kendaraan kredit dari debitur yang bermasalah di Jawa Barat yang mengalihkan kendaraan tersebut tanpa izin perusahaan pembiayaan.

Oknum ini diberi surat kuasa (*back up*) oleh debitur untuk menghadapi proses hukum di kepolisian atau *leasing* terkait permasalahan kredit macet. ●

# Stabilitas Terjaga dengan Kerja Bersama

Situasi ekonomi global yang tidak menentu menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia sepanjang tahun ini. Kendati demikian, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh rata-rata di atas 5% saat sejumlah negara justru mengalami tren pelambatan.

Kinerja ekonomi Indonesia setidaknya terbaca hingga kuartal III/2019 ketika Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan stabilitas sistem keuangan kuartal III/2019 tetap terkendali di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global.

Bahkan, dalam kajian terbaru BI saat perhelatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia pada 28 November 2019, prospek ekonomi Indonesia pada 2020 tetap terjaga dengan melanjutkan tren pertumbuhan.

Bank sentral memproyeksikan ekonomi Indonesia pada tahun depan tumbuh dikisaran 5,1%-5,5%, lalu inflasi terkendali sesuai sasaran 3% plus minus 1%.

Defisit transaksi berjalan 2020 di dalam kisaran 2,5%-3% dari PDB, kemudian nilai tukar rupiah bergerak stabil. Pertumbuhan dana pihak ketiga perbankan tumbuh dikisaran 8%-10%, serta penyaluran kredit mencapai 10%-12% sejalan turunnya suku bunga dan membaiknya prospek ekonomi.

Tentu saja, proyeksi tersebut menumbuhkan optimisme bagi perbaikan ekonomi ke depan. Hanya saja, upaya itu perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan memastikan bahwa terus berupaya meningkatkan kualitas belanja dan menjaga pelaksanaan

program-program prioritas agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu memberikan daya dorong yang optimal bagi perekonomian.

Dalam keterangan pasca rapat KSSK, pemerintah mengantisipasi potensi pelebaran defisit fiskal yang mungkin terjadi dan mempertimbangkan secara cermat beberapa opsi pendanaan yang dapat diambil, baik yang berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), penarikan pinjaman tunai, maupun penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Pemerintah akan mengedepankan prinsip efisiensi dan kehati-hatian dalam pengelolaan utang dengan tetap mengendalikan rasio utang dalam batas aman.

Upaya lainnya dilakukan dengan mempertajam kebijakan dan insentif yang telah dikeluarkan untuk pendalaman pasar keuangan, peningkatan akses keuangan, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, serta mendukung pembiayaan sektor produktif yang prospektif dengan tetap memperhatikan aspek prudensial.

Sementara itu, OJK berkomitmen membantu pemerintah menyikapi dampak negatif pelemahan ekonomi global dengan mendorong pengembangan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, menggerakkan industri berorientasi ekspor dan substitusi impor, mengembangkan pariwisata hingga mendorong berkembangnya industri kreatif dan industri di bidang teknologi.

OJK berupaya semaksimal mungkin menciptakan industri keuangan yang berdaya saing dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mengadopsi teknologi yang tepat guna, sehingga bisa mendorong

transformasi inovasi keuangan digital di sektor keuangan, termasuk mendorong berkembangnya *start-up fintech*.

Selain itu, OJK harus berperan lebih aktif dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan serta memastikan terjaganya perlindungan konsumen dan masyarakat yang akan membuka lebar kesempatan masyarakat meningkatkan kesejahteraannya. ●



## Memperluas Akses Keuangan dengan

# Bank Wakaf Mikro

**Bank Wakaf Mikro (BWM)** ditujukan untuk membangun ekosistem inklusi keuangan syariah di lingkungan pesantren yang sebelumnya belum terpapar produk keuangan.

BWM diharapkan mampu memberikan pembiayaan yang mudah dan murah khususnya bagi pelaku UMKM tanpa memberatkan mereka dalam membangun usahanya.





OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN

MENGUCAPKAN

*Selamat Hari Raya*

**NATAL**

25 DESEMBER 2019

**& TAHUN BARU**

1 JANUARI 2020



**SiKAPI**

UANG DENGAN BIJAK